

Katalog : 9302008.3508

INDIKATOR EKONOMI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018



KERJASAMA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG



INDIKATOR EKONOMI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018

Katalog BPS	: 9302008.3508
Ukuran Buku	: 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: 118 + ix
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Lumajang
Penyunting	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Lumajang
Perancang Sampul	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Lumajang
Diterbitkan Oleh	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

KATA PENGANTAR

Penyusunan publikasi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang yang ditujukan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Publikasi ini menyajikan tinjauan kinerja perekonomian kabupaten Lumajang secara deskriptif berdasarkan hasil tabulasi angka PDRB menurut Lapangan Usaha.

Dalam publikasi ini disajikan tabel-tabel besaran PDRB sektoral tahun 2013 - 2017 dan estimasi tahun 2018 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam nilai nominal dan persentase. Sebagai pelengkap ulasan tabel-tabel tersebut, disajikan pula konsep, definisi, ruang lingkup, dan metode penghitungan PDRB menurut lapangan usaha.

Perlu diketahui, bahwa mulai tahun 2015 penyajian data PDRB menggunakan tahun dasar 2010 dan berbasis implementasi *System of National Accounts* (SNA) 2008.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Lumajang, Oktober 2018

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lumajang

A Z W I R, S.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
PENJELASAN TEKNIS.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	1
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto.....	2
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto.....	2
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN.....	8
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	8
2.2 Pertambangan dan Penggalan.....	13
2.3 Industri Pengolahan.....	15
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas.....	22
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.....	24
2.6 Konstruksi.....	24
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	26
2.8 Transportasi dan Pergudangan.....	27
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	31
2.10 Informasi dan Komunikasi.....	33
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	35
2.12 Real Estat.....	42
2.13 Jasa Perusahaan.....	43
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.....	45
2.15 Jasa Pendidikan.....	45
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	46
2.17 Jasa Lainnya.....	46
III. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LUMAJANG.....	50
3.1 Struktur Ekonomi.....	50
3.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	53
3.3 PDRB Perkapita.....	56
3.4 Tingkat Perubahan Harga.....	59
3.5 Perbandingan dengan kabupaten sekitar.....	61
3.6 Keuangan Daerah dan PDRB	63

IV. PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN LUMAJANG MENURUT LAPANGAN USAHA.....	66
4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	66
4.2 Pertambangan dan Penggalian.....	69
4.3 Industri Pengolahan.....	69
4.4 Pengadaan Listrik dan Gas.....	74
4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.....	75
4.6 Konstruksi.....	75
4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	77
4.8 Transportasi dan Pergudangan.....	78
4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	80
4.10 Informasi dan Komunikasi.....	81
4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	82
4.12 Real Estat.....	83
4.13 Jasa Perusahaan.....	83
4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	83
4.15 Jasa Pendidikan.....	85
4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	85
4.17 Jasa lainnya.....	86`

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB (persen), Tahun 2013 - 2017..... 54
Gambar 2	PDRB Per Kapita (Juta Rp), 2013 - 2017 56
Gambar 3	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 65
Gambar 4	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen), 2015-2017 69
Gambar 5	Laju Pertumbuhan dan Distribusi Persentase PDRB Lapangan Usaha Konstruksi (Persen), 2013-2017 72
Gambar 6	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2013-2017..... 73
Gambar 7	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (persen), 2013-2017..... 76
Gambar 8	Laju Pertumbuhan dan Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (persen), 2013-2017..... 79

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	6
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	7
Tabel 1.3	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	7
Tabel 3.1	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017	51
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017	56
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2013–2017	58
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB (persen), 2013–2017	60
Tabel 3.5	Indikator Ekonomi di Wilayah Bakorwil III, 2017	61
Tabel 3.6	Belanja Daerah dan PDRB adhb Kabupaten Lumajang, 2011-2017	63
Tabel 4.1	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2013-2017	67
Tabel 4.2	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2013-2017	69
Tabel 4.3	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen), 2013-2017	71
Tabel 4.4	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2013-2017	74
Tabel 4.5	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2013-2017	77
Tabel 4.6	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2013-2017	79
Tabel 4.7	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2013-2017	80
Tabel 4.8	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2013-2017	82

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (miliar rupiah)	88
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (miliar rupiah)	91
Tabel 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (persen)	94
Tabel 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (persen)	97
Tabel 5	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (persen)	100
Tabel 6	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2013–2018	103
Tabel 7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (persen)	106
Tabel 8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (persen)	109
Tabel 9	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013–2018 (persen)	112
Tabel 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2018	115
Tabel 11	Beberapa Agregat PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Lumajang (persen), 2013–2018	118

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. **Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto** diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. **Output** adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah (negara, provinsi, dan sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun), tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksinya.
7. **Upah/gaji** adalah nilai tambah yang dibayarkan sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tenaga kerja (termasuk di dalamnya imputasi upah dan gaji).

I. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi selalu memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan kinerja perekonomian suatu wilayah, maka perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan ukuran kinerja suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan buku panduan *System of National Accounts* (SNA) yang berlaku secara internasional. SNA menyajikan aturan dan prinsip akuntansi secara umum, yang wajib digunakan oleh semua negara dalam menyusun statistik neraca nasional. Namun di dalam implementasinya, ada beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan ketersediaan data dan sistem perstatistikan yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia, secara bertahap telah melakukan penyesuaian yang dimaksud. SNA yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia disebut sebagai Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI).

Pada dasarnya, seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (unit rumahtangga, lembaga non-profit, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri) harus dicatat secara konsisten dan sistematis, dengan menggunakan standar aturan dan akuntansi yang berlaku secara umum. Khusus untuk penghitungan PDRB, aturan dan akuntansi yang perlu diperhatikan adalah bahwa :

- a. Total suplai (produk domestik/impor) dan penggunaan (domestik/ekspor) harus sama untuk setiap komoditas atau produk
- b. Total output suatu industri harus sama dengan total input (input antara plus input faktor)
- c. Total penerimaan yang tercipta dalam suatu perekonomian domestik harus sama dengan input faktor yang digunakan dalam aktivitas produksi

Ketiga aturan akuntansi tersebut merupakan dasar dalam penghitungan PDRB, baik yang dilakukan melalui pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), maupun pendapatan (*income approach*).

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional/regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB/Produk Domestik Regional Netto (PDRN) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRN per satu orang penduduk.
5. Tingkat perubahan harga di tingkat produsen yang ditunjukkan melalui indeks implisit PDRB, yaitu menggambarkan laju perubahan harga di tingkat produsen.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan perekonomian global dan regional yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional/regional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik neraca nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik neraca nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB ini dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi/kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA2008?

SNA2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran penggunaan data harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA₂₀₀₈;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP₂₀₁₀) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA₂₀₀₈ dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* dan *Cultivated Biological Resources (CBR)*:**
Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- **Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)*.**

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- **Valuasi :** Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009(KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010(KBKI2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge (IBSC)</i> .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)</i>
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

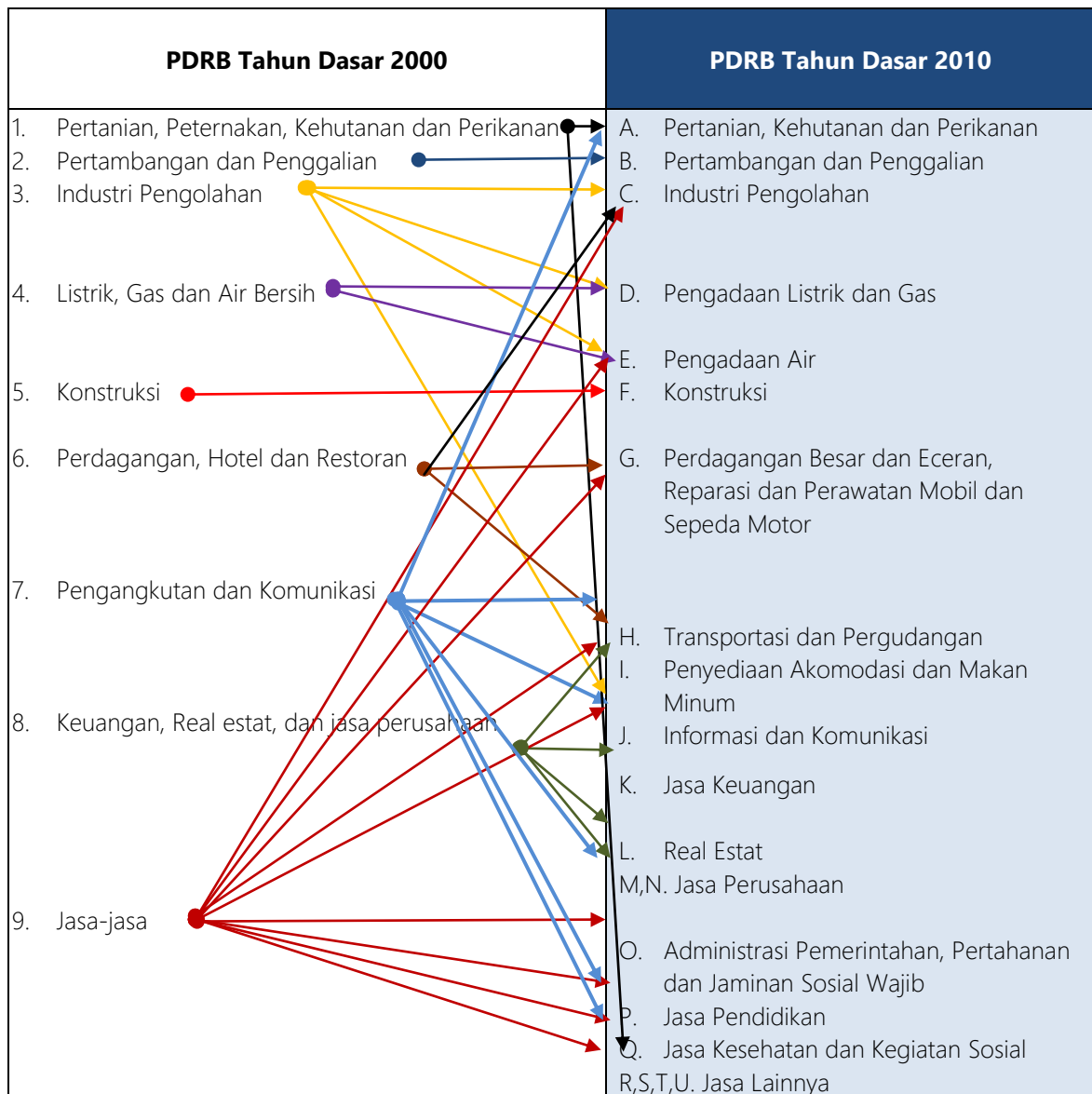
Tabel 1.3. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian, dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan

kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari data harga yang dikumpulkan oleh BPS kabupaten Lumajang secara rutin. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan survei khusus.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya

adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Pertanian kabupaten Lumajang. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan survei khusus.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Pertanian kabupaten Lumajang. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman

hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan data Sensus Pertanian dan hasil survei khusus.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, UPT Dinas Kehutanan di kabupaten Lumajang, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS dan survei khusus. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Lumajang. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS dan Survei Khusus neraca produksi.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang

menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas - BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi /Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah

hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan dan data dari Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau

kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi, dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penununan dan

penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan meubeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Percetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik

atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus.

Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan

usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri-BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi-BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran - BPS, sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga-BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas-BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri - BPS dan ditunjang data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lumajang. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga - BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK - BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun,

sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010.

Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, Baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB. Sumber data

produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN(Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah BPS - Subdit.Statistik Pertambangan dan Energi,PDAM, APBD (Kemenkeu); dataOutput Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS- BPS; Data Harga diperoleh dariSubdit Statistik Harga Produsen - BPS; Data Struktur Biyadiperoleh dariHasil Survei Tahunan Air Bersih – BPS dan Survei Khusus Neraca Produksi.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi

semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya

pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-*deflate* menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca

Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan

charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaran wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan kabupaten Lumajang dan Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia serta survei khusus neraca produksi. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga

Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar

harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia dan beberapa survei khusus BPS. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self*

service atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film

lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan

go public dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan

bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum

digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan

keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK)

umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik bertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif

sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K₁, K₂, K₃), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televise, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar,

pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri

oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization(WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

BAB III

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LUMAJANG

3.1. STRUKTUR EKONOMI

Struktur ekonomi kabupaten Lumajang didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga lapangan usaha tersebut secara total memberikan kontribusi sebesar 70,54 persen pada tahun 2017. Kategori Konstruksi serta Pertambangan dan Penggalian juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian kabupaten Lumajang masing-masing sebesar 7,75 persen dan 4,12 persen, sedangkan kategori lain peranannya di bawah 4 persen.

Berdasarkan besaran nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) maupun atas dasar harga konstan 2010 (adhk) tahun 2013-2017, secara makro kegiatan perekonomian kabupaten Lumajang cukup prospektif dengan laju pertumbuhan mengalami sedikit percepatan. Nilai PDRB adhb yang tercipta di kabupaten Lumajang pada tahun 2016 mencapai Rp. 29.021 milyar naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 26.638 milyar. Sedangkan PDRB adhb yang tercipta pada tahun 2013 sampai 2015 berturut-turut sebesar Rp. 19.636 milyar; Rp. 21.983 milyar; dan Rp. 24.417 milyar. Sehingga dengan demikian secara total dari tahun 2013 hingga 2017 terjadi peningkatan nilai PDRB adhb sebesar 47,79 persen.

Tabel 3.1						
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2017						
Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Primer		43,71	43,60	43,54	43,09	41,88
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,82	39,64	39,68	39,05	37,76
B	Pertambangan dan Penggalian	3,89	3,96	3,85	4,04	4,12
II Sekunder		25,92	26,39	26,40	26,70	27,23
C	Industri Pengolahan	18,57	18,85	18,84	18,96	19,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	7,25	7,44	7,46	7,65	7,75
II Tersier		31,36	31,81	32,48	32,98	33,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,99	12,89	12,85	12,93	13,40
H	Transportasi dan Pergudangan	1,61	1,65	1,67	1,71	1,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,06	1,11	1,15	1,18	1,23
J	Informasi dan Komunikasi	3,11	3,05	2,99	3,02	3,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,67	1,70	1,71	1,72
L	Real Estat	1,59	1,52	1,57	1,56	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	3,15	3,11	3,04	2,97
P	Jasa Pendidikan	2,50	2,53	2,54	2,52	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65	0,66	0,67	0,68	0,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,48	1,46	1,49	1,54	1,59
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100
* Angka sementara						
** Angka sangat sementara						

Dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya pangsa kategori primer yang tradisional. Pada saat yang bersamaan kategori sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan kategori tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing kategori meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Adapun laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan. Untuk daerah yang mengandalkan kekayaan sumber daya alam seperti kabupaten Lumajang, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan-daerah kawasan industri seperti Surabaya, kabupaten Pasuruan, Sidoarjo dan daerah lainnya. Perbedaan ini karena untuk daerah-daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada kategori primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada kategori lainnya.

Dari Tabel 3.1 di atas terlihat perubahan *share* dalam PDRB kabupaten Lumajang selama tahun 2013-2017, pangsa kategori sekunder yang dimotori oleh kategori industri pengolahan dan kategori konstruksi terus meningkat. Pada tahun 2013, pangsa kategori sekunder masih mencapai 25,92 persen dan secara konsisten naik hingga mencapai 27,23 persen pada tahun 2017. Pada sisi yang lain, pangsa kategori tersier meskipun sempat terkoreksi pada tahun 2013 menjadi 31,36 persen tetapi dalam beberapa tahun terakhir kembali meningkat yaitu menjadi 32,98 persen di tahun 2016 dan menjadi 33,52 persen pada tahun 2017.

Dipihak lain, kategori primer konsisten mengalami penurunan peranannya. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini menjadi sebesar 41,88 persen atau menurun sebesar 1,21 poin dibandingkan tahun 2016. Semakin berkurangnya luas lahan dan terlambatnya musim hujan pada penghujung tahun nampaknya berperan terhadap penurunan kategori ini. Baik kategori pertanian maupun kategori penggalian mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,29 poin dan 0,08 poin. Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika pada komposisi PDRB kabupaten Lumajang yang mengarah berubah dari daerah yang perekonomiannya bergantung pada pertanian menjadi daerah yang perekonomiannya lebih seimbang dengan sektor manufaktur kini lebih dominan daripada sektor pertanian.

Ada tiga gejala menarik selama periode 2013-2017 mengenai pergeseran struktur ekonomi yang dapat diamati dari tabel 3.1. **Pertama**, Tren penurunan kategori primer memasuki tahun 2017 kembali berlangsung. **Kedua**, Peranan lapangan usaha tersier dalam tiga

tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor pendukung peningkatan peranan pada kategori ini diduga karena bermunculan beberapa obyek wisata baru dan diskotik baru yang pada gilirannya berpengaruh pada meningkatnya jumlah pengunjung hotel, penginapan dan warung-warung baru. Fenomena inilah yang menyebabkan peranan kategori akomodasi dan makan minum meningkat dari 1,18 persen menjadi 1,23 persen. *Ketiga*, pergeseran perekonomian kabupaten Lumajang dari kategori primer ke kategori sekunder dan tersier masih terus berlangsung. Pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. Namun, pergeseran yang terjadi di kabupaten Lumajang nampaknya telah menyeret aset penting kategori pertanian ke dalamnya. Keadaan ini dengan mudah dapat dilihat dari berubahnya lahan hamparan tanaman menjadi lahan bangunan baik pemukiman, pertokoan, perkantoran, perumahan maupun lainnya. Apabila keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian yang jelas, maka bukan tidak mungkin pada suatu saat nanti, kabupaten Lumajang bukan lagi daerah surplus beras dan pemasok hasil tanaman hortikultura ke daerah lain.

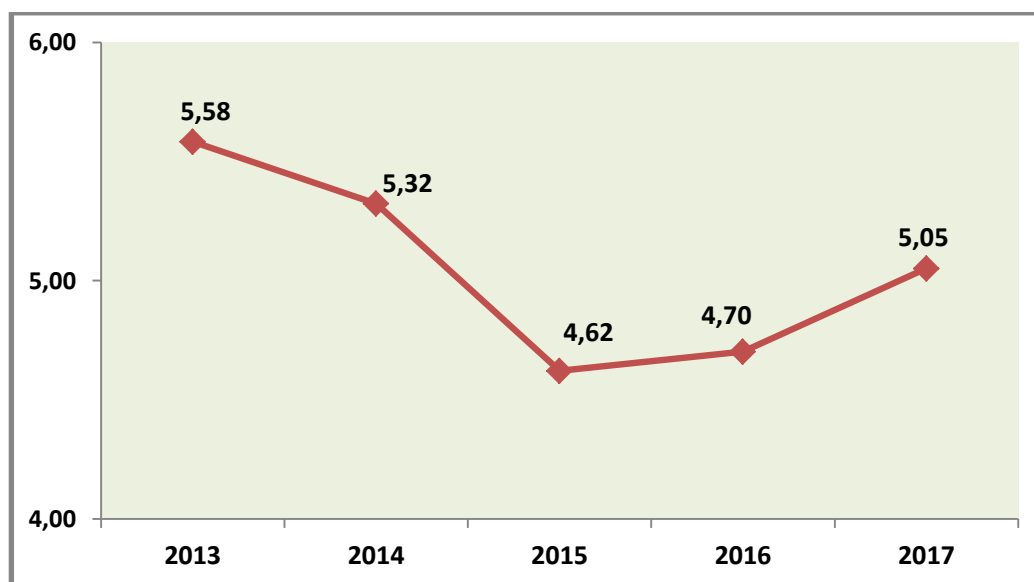
Struktur lapangan usaha masyarakat kabupaten Lumajang dari tahun ketahun telah bergeser perlahan-lahan dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 masih dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 37,76 persen sedikit menurun jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 39,05 persen. Kemudian peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 19,38 persen atau naik 0,42 poin dari tahun 2016; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada tahun 2017 sebesar 13,40 persen; lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 7,75 persen; lapangan usaha kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 3,07 persen, lapangan usaha kategori Administrasi pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 2,97 persen; dan lapangan usaha kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,12 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya jauh di bawah 3 persen.

3.2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dinamis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Berdasarkan

nominal PDRB adhk 2010, laju pertumbuhan PDRB pada Tahun 2017 digerakkan oleh semua kategori kecuali sub kategori pertambangan bijih logam dengan ditutupnya areal pertambangan pasir besi dan sub kategori Kehutanan dan penebangan kayu yang mengalami penurunan produksi. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun 2017 tumbuh sebesar 9,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,96 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,76 persen; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,64 persen, serta kategori Informasi dan Komunikasi 7,33 persen. Selanjutnya kategori Industri Pengolahan; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; Konstruksi; Jasa Perusahaan; Jasa Lainnya; Jasa Pendidikan yang laju pertumbuhannya berkisar 5 sampai 7 persen yaitu masing-masing sebesar 7,04 persen; 6,12 persen; 6,06 persen; 6,02 persen; 5,95 persen dan 5,92 persen.

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang, 2013-2017 (persen)



Adapun laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang tahun 2017 sebesar 5,05 persen dan sedikit mengalami percepatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 4,70 persen. Berdasarkan gambar 3.1 di atas tampak bahwa sebenarnya sudah dalam periode lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang cenderung melambat meskipun pencapaiannya masih di atas 4 persen dan akhirnya di tahun 2017 mengalami percepatan pertumbuhan hingga mencapai 0,35 poin. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi kabupaten Lumajang, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah dan kinerja produktifitas komoditi sektor pertanian sebagai *leading sector* yang masih belum maksimal. Mengingat potensi sumber pendapatan terbesar kabupaten Lumajang berasal dari sektor pertanian (38,65 persen), maka faktor sumber daya alam perlu dikelola dan direncanakan lebih bijak, program intensifikasi dan teknologi pertanian perlu selalu ditingkatkan, dan ketersediaan saprodi sebagai input pertanian perlu dipermudah. Adapun beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang diantaranya laju inflasi Jawa Timur yang berhasil ditekan pada level 4,04 persen; lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang sebesar 2,74 persen.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,72	3,19	3,14	2,61	1,96
B	Pertambangan dan Penggalian	0,88	3,40	-0,37	7,72	7,76
C	Industri Pengolahan	7,26	7,31	5,44	5,14	7,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	6,34	3,23	2,14	3,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	1,25	2,22	3,14	2,66
F	Konstruksi	7,24	6,13	3,20	5,43	6,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	6,87	6,76	6,39	7,64
H	Transportasi dan Pergudangan	8,15	8,89	7,60	7,67	7,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,32	10,08	9,75	7,60	9,31
J	Informasi dan Komunikasi	11,45	9,57	8,86	8,11	7,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,26	7,18	6,07	5,35	4,92
L	Real Estat	6,93	6,66	6,92	5,94	5,34
M,N	Jasa Perusahaan	6,06	6,64	6,92	5,58	6,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,99	1,11	3,68	4,19	3,31
P	Jasa Pendidikan	6,87	6,88	7,43	5,78	5,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,69	11,19	5,61	5,32	6,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,39	5,87	6,61	6,03	5,95
Produk Domestik Regional Bruto		5,58	5,32	4,62	4,70	5,05

* *Angka sementara*

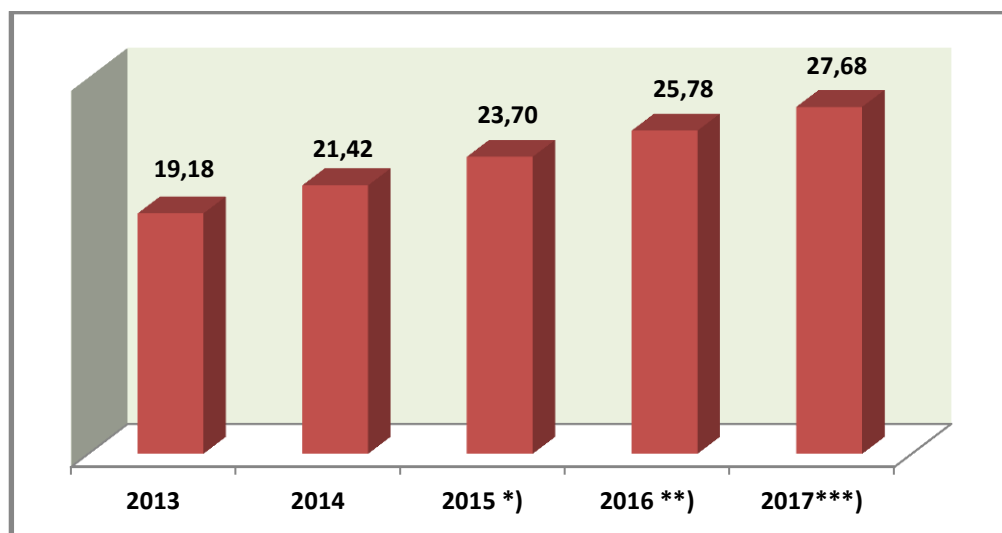
** *Angka sangat sementara*

3.3 PDRB PERKAPITA

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan regional dalam hubungannya dengan kemajuan kategori ekonomi tersebut adalah PDRB

Perkapita, yang biasanya dipakai sebagai indikator makro perkembangan kesejahteraan rakyat. PDRB per kapita menggambarkan nilai rata-rata PDRB yang bisa diterima oleh setiap penduduk kabupaten Lumajang. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada umumnya PDRB Perkapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan baik dalam pembentukan PDRB maupun pendapatan regional.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Kabupaten Lumajang, 2013-2017 (juta rupiah)



Dari gambar 2 di atas tampak bahwa PDRB per kapita kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir selalu meningkat. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara makro kondisi kesejahteraan masyarakat kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun semakin membaik meskipun masih perlu mempertimbangkan juga faktor inflasi. Selama lima tahun terakhir ini, PDRB Perkapita mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2013, PDRB Perkapita sebesar Rp.19,18 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp. 27,68 pada tahun 2017 atau meningkat 44,34 persen. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yang meningkat sebesar 11,67 persen. Adapun selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita kabupaten Lumajang selalu mengalami kenaikan, yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 19,18 juta; tahun 2014 sebesar Rp. 21,42 juta; tahun 2015 sebesar 23,70 juta;

tahun 2016 sebesar Rp. 25,77 juta, kemudian tahun 2017 mencapai Rp. 27,68 juta. Pada tahun 2017 ini perkembangan PDRB perkapita masih cukup tinggi karena masih meningkat sebesar 7,37 persen.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Lumajang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (ribu rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.638,0	8.490,2	9.405,8	10.069,8	10.454,3
B	Pertambangan dan Penggalian	745,4	847,8	913,6	1.040,7	1.139,8
C	Industri Pengolahan	3.561,0	4.038,3	4.466,0	4.887,4	5.364,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,3	9,3	10,3	10,9	12,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,7	12,2	12,8	13,5	14,1
F	Konstruksi	1.390,7	1.593,1	1.767,8	1.972,0	2.146,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.491,6	2.760,8	3.045,8	3.333,8	3.710,2
H	Transportasi dan Pergudangan	309,1	354,0	395,9	441,5	492,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,9	238,6	273,1	304,5	341,4
J	Informasi dan Komunikasi	597,2	652,9	708,7	778,9	848,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	313,2	358,6	402,9	440,3	476,3
L	Real Estat	304,6	324,8	371,9	403,3	434,3
M,N	Jasa Perusahaan	61,5	67,3	74,4	81,2	88,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	656,7	674,2	737,8	782,8	822,7
P	Jasa Pendidikan	480,2	541,7	601,3	650,5	703,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,9	141,9	159,4	176,3	195,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	283,2	312,5	353,9	396,5	439,4
Produk Domestik Regional Bruto		19.180,1	21.418,2	23.701,5	25.784,0	27.684,5
<i>* Angka sementara</i>						
<i>** Angka sangat sementara</i>						

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa PDRB per kapita kabupaten Lumajang telah meningkat cukup tajam selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 3.3. Meskipun demikian tetap harus dipertanyakan apakah PDRB perkapita adalah alat ukur yang layak untuk kabupaten Lumajang karena penduduk kabupaten Lumajang memiliki karakteristik ketidaksetaraan yang cukup tinggi dalam distribusi pendapatan. Mencapai level PDRB per kapita sebesar 27,68 juta saja dianggap sebagai langkah yang penting sebab hal ini seharusnya dapat menyebabkan percepatan pengembangan di sejumlah sektor (seperti retail, otomotif, properti) karena permintaan konsumen yang meningkat dan karenanya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

3.4 TINGKAT PERUBAHAN HARGA

Tingkat perkembangan harga atau lebih dikenal dengan inflasi/deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Yang dimaksud perubahan harga disini adalah perubahan harga di tingkat produsen berdasarkan indeks implisit PDRB (PDRB adhb dibagi PDRB adhk dikali 100) sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi tidak berperan. Jika nilainya positif disebut inflasi tetapi jika nilainya negatif disebut deflasi. Umumnya inflasi PDRB ini dimanfaatkan sebagai indikator daya elastisitas produsen dalam menghadapi isu global dan kebijakan pemerintah yang rentan berimplikasi terhadap perubahan harga barang/jasa. Inflasi PDRB sedikit berbeda dengan inflasi yang diperoleh dari perubahan IHK atau yang biasa dikenal dengan inflasi saja. Kedua tingkat perubahan harga tersebut berbeda sisi penghitungan dan rentang implikasinya, inflasi PDRB adalah perubahan harga yang dilihat dari sisi produsen dan inflasi IHK dari sisi konsumen. Secara makro, baik inflasi PDRB maupun inflasi IHK keduanya merupakan indikator perubahan harga barang dan jasa yang bermanfaat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga-harga barang/jasa dan kebijakan perekonomian lainnya.

Tingkat inflasi PDRB di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 mencapai 2,52 persen atau mengalami perlambatan sangat signifikan sebesar 1,72 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,25 persen. Hal ini mencerminkan bahwa kenaikan harga barang-barang yang dihasilkan produsen di tahun 2017 secara umum sedikit lebih lambat dibandingkan kenaikan harga tahun sebelumnya. Kondisi ini ternyata masih dipicu oleh

naiknya harga komoditi di sektor primer seperti kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta produk Penggalian dan Industri pengolahan akibat permintaan yang masih cukup tinggi.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Lumajang, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,12	7,99	7,81	4,69	2,13
B	Pertambangan dan Penggalian	3,34	10,26	8,57	6,11	1,94
C	Industri Pengolahan	2,94	5,95	5,28	4,44	2,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,93	6,12	6,89	3,94	12,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,89	2,88	2,64	3,08	1,65
F	Konstruksi	6,33	8,21	7,92	6,17	2,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,76	3,94	3,72	3,23	3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	5,04	5,43	4,33	3,90	3,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	6,59	4,67	3,99	2,88
J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,03	0,09	2,01	1,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	7,10	6,31	4,08	3,43
L	Real Estat	6,67	0,23	7,48	2,70	2,53
M,N	Jasa Perusahaan	5,47	2,97	3,81	3,62	2,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	1,78	5,95	2,18	2,03
P	Jasa Pendidikan	5,78	5,81	3,72	2,62	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,22	3,24	6,82	5,37	4,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,62	4,49	6,62	6,02	4,92
Produk Domestik Regional Bruto		4,58	6,29	6,17	4,25	2,52

* *Angka sementara*

** *Angka sangat sementara*

Inflasi PDRB di kategori Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tahun 2017 mencapai 2,13 persen atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,69`persen. Peranan kategori ini sebagai sektor paling dominan dalam pembentukan PDRB akan sangat berpengaruh pada inflasi PDRB di tingkat regional. Relatif lebih tingginya inflasi di kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pastinya juga akan berimbas pada inflasi di kategori Industri pengolahan dan

Penyediaan akomodasi dan makan minum yang banyak menggunakan hasil-hasil pertanian dalam proses produksinya. Tercatat pada tahun 2017 inflasi kategori industri pengolahan mencapai 2,85 persen atau turun 1,59 poin dari tahun sebelumnya sedangkan di kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum inflasinya mencapai 2,88 persen. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi makro ekonomi kabupaten Lumajang selama tahun 2017 relatif lebih kondusif dalam sisi pengendalian harga di tingkat produsen sehingga sangat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

3.5 PERBANDINGAN DENGAN KABUPATEN SEKITARNYA

Perkembangan ekonomi di wilayah Bakorwil III relatif penting sebagai indikator perekonomian Jawa Timur karena lebih dari 26 persen kue pembangunan Jawa Timur dihasilkan di wilayah ini. Adapun khusus untuk wilayah Bakorwil III sendiri kontribusi terbesar diberikan oleh kabupaten Pasuruan sebesar 6,13 persen, kabupaten Malang sebesar 4,38 persen, dan kabupaten Banyuwangi sebesar 3,55 persen.

Tabel 3.5
Indikator Ekonomi di Wilayah Bakorwil III, 2017

<i>Kab/Kota</i>	<i>PDRB ADHB (miliar Rp.)</i>	<i>Peranan Terhadap PDRB Jawa Timur (persen)</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi (persen)</i>	<i>PDRB ADHB per Kapita (ribu rupiah)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prov. Jawa Timur	2 019 199,7	100	5,45	51 387,1
Kab. Malang	89 180,2	4,38	5,43	34 611,6
Kab. Lumajang	28 703,9	1,41	5,05	27 685,1
Kab. Jember	67 476,1	3,31	5,11	27 765,6
Kab. Banyuwangi	72 245,7	3,55	5,45	45 015,7
Kab. Bondowoso	17 156,7	0,84	5,03	22 313,3
Kab. Situbondo	17 545,0	0,86	5,07	25 927,3
Kab. Probolinggo	29 993,7	1,47	4,46	25 964,0
Kab. Pasuruan	124 979,8	6,13	5,72	77 854,5
Kota Malang	62 359,3	3,06	5,69	72 393,0
Kota Probolinggo	9 680,0	0,48	5,88	41 527,4
Kota Pasuruan	7 125,2	0,35	5,47	36 040,4
Kota Batu	14 351,5	0,70	6,56	70 350,3

Selama tahun 2017 kabupaten Pasuruan sebagai salah satu sentra Industri di Jawa Timur mampu menciptakan PDRB adhb sebesar Rp. 124,98 trilyun atau 6,13 persen dari PDRB adhb Jawa Timur. Sedangkan untuk kabupaten Malang dan kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 masing-masing mampu menciptakan PDRB adhb sebesar Rp. 89,18 trilyun dengan *share* terhadap perekonomian Jawa Timur sebesar 4,38 persen dan Rp. 72,34 trilyun dan *share* sebesar 3,55 persen. Adapun kabupaten Lumajang hanya berada di posisi terbesar ke 7 dari 12 kabupaten/kota di wilayah Bakorwil III, yaitu mampu menciptakan PDRB adhb tahun 2017 sebesar Rp. 28,70 trilyun dan *share* terhadap perekonomian Jawa Timur sebesar 1,41 persen.

Dari sisi kecepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017, kota Batu merupakan wilayah yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2017 kinerja perekonomian kota Batu mampu tumbuh sebesar 6,56 persen dan jauh diatas angka total pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hal ini disebabkan kota Batu sebagai ikon wisata unggulan di Jawa Timur selalu menjadi tujuan utama para wisatawan di setiap akhir pekan sehingga geliat kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum, Jasa Hiburan, dan kategori Perdagangan sebagai sektor unggulan menjadi sangat menonjol di sepanjang tahun. Adapun wilayah lain yang perekonomiannya mampu tumbuh di atas angka Jawa Timur adalah kota Probolinggo, kabupaten Pasuruan, kota Malang, dan kota Pasuruan yang masing-masing tumbuh sebesar 5,88 persen, 5,72 persen, 5,69 persen dan 5,47 persen. Kabupaten Lumajang sebagai daerah agraris ternyata di tahun 2017 hanya mampu tumbuh sebesar 5,05 persen atau yang terendah nomor tiga dibandingkan wilayah lain di Bakorwil III.

Pada tahun 2017 PDRB per kapita Jawa Timur mencapai Rp. 51,38 juta dan ada beberapa kabupaten/kota di wilayah Bakorwil III yang memiliki angka PDRB per kapita di atas angka Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan mempunyai PDRB per kapita tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, yaitu mencapai Rp. 77,85 juta disusul kemudian kota Malang dengan PDRB per kapita mencapai Rp. 72,39 juta dan terakhir kota Batu di tempat ketiga dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 70,35 juta. Sedangkan kabupaten Lumajang hanya berada di posisi ke 9 PDRB per kapita hanya sebesar Rp. 27,68 juta. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Bakorwil III relatif lebih besar dibandingkan kabupaten/kota di wilayah Bakorwil lainnya sehingga secara signifikan menurunkan angka PDRB per kapita dan mengakibatkan hanya 3 kabupaten/kota di wilayah Bakorwil III yang memiliki PDRB per kapita diatas angka Jawa Timur.

3.6 KEUANGAN DAERAH DAN PDRB

Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka peranan belanja APBD sangatlah penting dalam pembiayaan pembangunan daerah demi kelangsungan (*sustainable*) pembangunan dan mendorong laju perekonomian di suatu wilayah.

Berdasarkan tabel 3.7. Anggaran Belanja Daerah kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten Lumajang pada tahun 2011 mencapai Rp. 995 milyar meningkat signifikan sebesar 17,54persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 10,60 persen. Sedangkan untuk tahun 2013 hingga 2015 belanja daerah kabupaten Lumajang selalu mengalami peningkatan hingga di atas 10 persen, yaitu masing-masing sebesar 12,43 persen; 19,02 persen; dan 12,72 persen. Berdasarkan data realisasi belanja daerah kabupaten Lumajang tahun 2015 yang mendorong kenaikan belanja daerah antara lain; belanja pegawai, belanja operasional barang dan jasa serta belanja modal berupa pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan relatif sama dengan tahun sebelumnya tetapi dengan laju kenaikan yang meningkat signifikan.

Tabel 3.6
Belanja Daerah dan PDRB adhb Kabupaten Lumajang, 2011-2017

<i>Tahun</i>	<i>PDRB ADHB (milyar Rp.)</i>	<i>Belanja Daerah (milyar Rp.)</i>	<i>Pertumbuhan Belanja Daerah (%)</i>	<i>Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB ADHB (%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	16.078,50	995,03	17,54	6,19
2012	17.783,35	1.100,51	10,6	6,19
2013	19.636,95	1.237,25	12,43	6,30
2014	21.983,12	1.472,59	19,02	6,70
2015	24.417,11	1.659,87	12,72	6,80
2016	26.652,80	1.646,41	-0,81	6,18
2017	28.703,90	1.998,72	21,40	6,96

Berdasarkan tabel 3.7. dapat dilihat bahwa rasio pengeluaran belanja daerah kabupaten Lumajang terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan pada periode tahun 2011-2017 peningkatan belanja daerah tidak sepesat kenaikan PDRB yang tercipta. Peranan pengeluaran pemerintah daerah sebagai salah satu faktor pendorong kinerja ekonomi regional kurang berdampak signifikan. Pada periode 2011-2017 besaran rasio APBD terhadap penciptaan PDRB berada pada kisaran 6,19 sampai dengan 6,96 persen. Hal ini menunjukkan pada periode tersebut laju peningkatan kinerja perekonomian sektor riil (PDRB) cenderung melambat sedangkan pengeluaran belanja pemerintah daerah makin besar.

Peranan pemerintah kabupaten Lumajang sampai dengan saat ini masih cukup besar, namun demikian besarnya peranan pemerintah bukan hanya dinilai dari besarnya anggaran pembangunan yang direalisasikan. Bagi masyarakat umum peran pemerintah yang paling penting adalah dampak positif yang mampu diciptakan dari berbagai kebijakan publik yang diterapkan, salah satunya adalah strategi alokasi anggaran yang mampu mendongkrak roda perekonomian, peningkatan kesempatan kerja yang tentunya harus disertai dengan penciptaan kondusifitas iklim usaha.

Rasio APBD terhadap PDRB adhb pada tahun 2017 adalah yang paling tinggi selama periode 2011 sampai 2017 karena pada tahun tersebut terjadi kenaikan belanja daerah sebesar 21,40 persen akan tetapi laju peningkatan PDRB adhb pada tahun 2017 adalah yang terendah. Bisa disimpulkan bahwa rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB makin meningkat yang berarti bahwa kenaikan PDRB pada tahun 2017 tidak sepesat kenaikan belanja daerah. Pada tahun 2012 terjadi perlambatan kenaikan belanja daerah dari 17,54 persen di tahun 2011 menjadi hanya 10,60 persen di tahun 2012. Akan tetapi dari rasio belanja daerah terhadap PDRB pada tahun 2012 nilainya relatif sama dengan tahun 2011. Hal ini menunjukkan prosentase kenaikan belanja daerah lebih rendah dibandingkan persentase kenaikan PDRB yang tercipta. Jika peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam perekonomian yang diakibatkan oleh efek kebijakan pemerintah daerah semakin besar, maka persentase peranan APBD terhadap penciptaan PDRB akan terjadi sebaliknya, yaitu nilainya akan semakin menurun. Yang berarti bahwa peningkatan kinerja perekonomian regional tidak dominan tergantung dari besarnya

realisasi belanja yang dialokasikan pemerintah daerah tetapi dari faktor konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit, investasi, dan permintaan dari luar kabupaten.

BAB IV

PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN LUMAJANG MENURUT LAPANGAN USAHA

Sesuai implementasi SNA 2008 maka PDRB kabupaten Lumajang menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi beberapa subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Adapun perkembangan setiap lapangan usaha akan diuraikan di bab berikut ini.

4.1. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Kategori usaha ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri dari : tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Subkategori Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan utama penduduk dalam penyerapan tenaga kerja di kabupaten Lumajang.

Pada tahun 2017 lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 37,76 persen dan tumbuh sebesar 1,96 persen atau kembali melambat sebesar 0,65 poin dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,61 persen. Lapangan usaha subkategori Tanaman Pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap Lapangan usaha kategori ini, yaitu tercatat sebesar 24,98 persen dari seluruh nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adapun pertumbuhan subkategori Tanaman Pangan tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,19 persen, lebih lambat dibanding tahun 2016 yang tumbuh 2,49 persen.

Pertumbuhan pada kategori ini terbesar adalah lapangan usaha subkategori Tanaman Hortikultura yaitu sebesar 4,53 persen diikuti oleh subkategori Perikanan sebesar 3,69 persen. Subkategori Kehutanan dan penebangan pada tahun ini mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya sehingga tumbuh sebesar minus 5,29 persen. Sedangkan lapangan usaha yang lain tetap mencetak laju pertumbuhan positif yaitu subkategori Tanaman Perkebunan tumbuh 2,71 persen melambat dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 3,65 persen akibat perlambatan produksi tebu dan tembakau; subkategori Peternakan tumbuh

sebesar 2,46 persen; serta subkategori Jasa Pertanian dan perburuan tumbuh 2,69 persen. Secara umum pertumbuhan ekonomi di lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan belum mampu memberikan andil yang maksimal dalam mendongkrak ekonomi karena masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi regional.

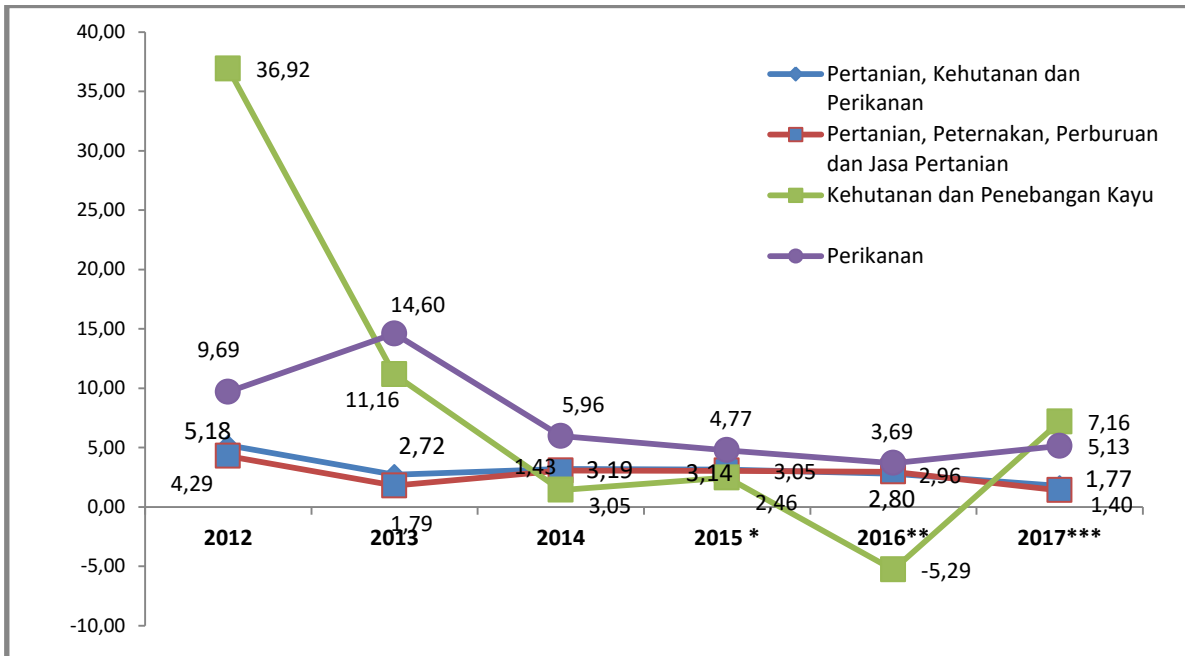
Tabel 4.1 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	91,20	90,96	90,87	91,01	91,05
	a. Tanaman Pangan	26,96	26,43	26,56	26,22	24,98
	b. Tanaman Hortikultura	17,57	17,47	17,38	18,01	18,38
	c. Tanaman Perkebunan	24,40	24,96	24,75	24,49	23,95
	d. Peternakan	21,10	20,86	20,89	20,98	21,88
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,18	1,24	1,29	1,30	1,29
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,58	2,60	2,64	2,44	2,57
3	Perikanan	6,21	6,44	6,50	6,55	6,96
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 3. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2012-2017 (persen)



Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir pertumbuhan lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung melambat. Kondisi tersebut juga terjadi pada hampir semua subkategori, hanya pada subkategori Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 subkategori Kehutanan dan penebangan kayu mampu tumbuh hingga 11,16 persen dan tahun sebelumnya juga sudah tumbuh sebesar 36,92 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 terjadi peningkatan permintaan yang cukup besar pada hasil industri pengolahan kayu yang berorientasi ekspor sehingga intensitas penebangan berbagai komoditas kehutanan terutama sengon/albasia cukup tinggi. Sehingga di beberapa tahun berikutnya mengalami perlambatan akibat berkurangnya populasi tanaman kehutanan. Dan pada tahun 2014 serta 2015 masing-masing tumbuh sebesar 1,43 persen dan 2,46 persen hingga akhirnya di tahun 2016 tumbuh sebesar minus 5,29 persen dan kembali naik pada tahun 2017 sebesar 7,16 persen.

4.2. Pertambangan dan Penggalian

Di tahun 2017 peranan kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap penciptaan PDRB di kabupaten Lumajang sebesar 4,12 persen meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,07 persen dengan komoditi unggulan bahan galian golongan C khususnya jenis pasir, batu coral, dan sirtu. Sedangkan untuk pertambangan pasir besi yang bersifat ilegal sejak kasus kematian salim kancil di akhir tahun 2015 telah ditutup total. Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha yang berkontribusi adalah subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2017 akibat tidak adanya aktifitas pertambangan pasir besi, sehingga meningkat dibanding tahun 2015 yang memiliki kontribusi sebesar 96,98 persen. Sedangkan lapangan usaha subkategori pertambangan bijih logam pada tahun 2015 masih memiliki kontribusi sebesar 3,02 persen.

Secara keseluruhan pada tahun 2017, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat menonjol dibandingkan kategori lainnya, yaitu mencapai 6,88 persen setelah di tahun sebelumnya hanya tumbuh minus 1,73 persen. Hal ini dikarenakan aktifitas penggalian pasir selama 2017 sangat tinggi guna melayani permintaan dari luar kabupaten setelah di akhir tahun 2015 sempat ditutup untuk sementara waktu.

Tabel 4.2 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	3,94	4,16	3,02	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	96,06	95,84	96,98	100,00	100,00
Pertambangan dan Penggalian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.3. Industri Pengolahan

Peran kategori industri pengolahan sangat penting dalam perekonomian kabupaten Lumajang. Dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, sumbangan kategori ini

menempati urutan kedua dalam pembentukan PDRB. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor, peran kategori ini lebih besar dibandingkan dengan ekspor kategori pertanian. Jika dilihat kontribusinya terhadap tenaga kerja, kategori ini rata-rata menyerap sekitar 11 persen dari total tenaga kerja. Kategori industri memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward* dan *forward linkage*) yang besar sehingga peningkatan kinerja industri pengolahan dapat berefek pada kategori industri lainnya.

Di tengah perannya yang penting dalam perekonomian, kinerja kategori industri pengolahan mengalami tren perlambatan pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir ini. Selama tahun 2017 tumbuh sebesar 7,59 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yaitu 2015 sebesar 5,44 persen dan 2016 sebesar 4,61 persen. Kinerja industri pengolahan di tahun 2017 antara lain ditopang oleh sub lapangan usaha industri makanan dan minuman dan industri barang galian bukan logam yang mampu tumbuh di atas angka pertumbuhan total, yaitu masing-masing sebesar 10,84 persen dan 7,86 persen. Hal ini dikarenakan selama tahun 2017 pangsa pasar industri UKM hasil makanan olahan (krupuk, kripik, tahu, tempe) masih cukup menjanjikan. Selain itu industri barang galian bukan logam memiliki perkembangan yang cukup menjanjikan karena dibarengi dengan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang naik pada tahun 2017.

Tabel 4.3 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	52,63	52,98	54,11	55,20	56,74
3. Pengolahan Tembakau	4,68	4,61	4,56	4,60	4,56
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2,26	2,23	2,21	2,18	2,10
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	26,79	26,81	25,81	25,16	24,50
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,49	1,41	1,36	1,32	1,30
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,41	0,40	0,39	0,37	0,35
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
10. Industri Barang Galian bukan Logam	1,33	1,25	1,22	1,20	1,19
11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	6,36	6,33	6,36	6,08	5,59
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14. Industri Alat Angkutan	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07
15. Industri Furnitur	2,41	2,39	2,44	2,41	2,23
16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1,28	1,25	1,21	1,17	1,12
Industri Pengolahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

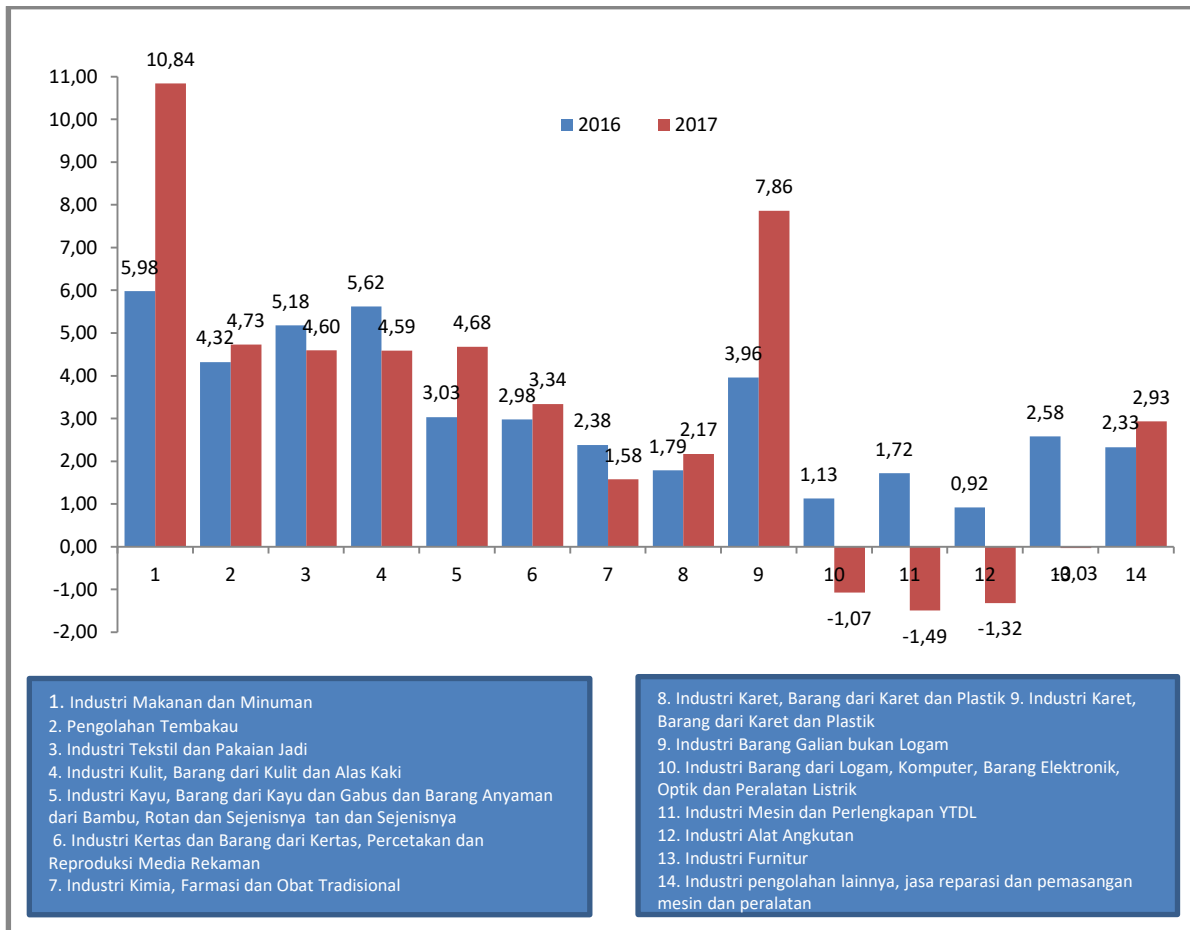
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah sub kategori Industri Pengolahan Makanan dan Minuman sebesar 56,74 persen dan sub kategori Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 24,50 persen. Berikutnya sub kategori Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 5,59 persen; sub kategori Industri pengolahan tembakau sebesar 4,56 persen. Sedangkan subkategori yang lain memiliki kontribusi di bawah empat persen. Subkategori industri Makanan dan minuman selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan *share* dibandingkan subkategori lainnya. Hal ini

dikarenakan semua produk makanan olahan dari industri level UKM memiliki pangsa pasar tetap dan terus berkembang seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

Gambar 4. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan 2016-2017 (persen)



Pembangunan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pentingnya kategori ini juga terlihat dari perannya terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja dan juga keterkaitannya yang cukup luas dengan sektor-sektor lainnya di dalam perekonomian. Untuk itu, perkembangan sektor ini menjadi cukup menentukan percepatan pertumbuhan perekonomian ke depan. Salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh industri

pengolahan yakni perlunya peningkatan nilai tambah dari produk-produk berbasis SDA. Pada saat ini beberapa sub kategori yang menjadi andalan kategori industri pengolahan lebih banyak berbasis SDA seperti sub kategori makanan dan minuman dan industri pengolahan kayu. Selama tahun 2017 kedua sub kategori ini masih tumbuh positif meskipun laju pertumbuhannya masih dibawah angka pertumbuhan kabupaten.

Selain itu, pembangunan sektor industri ke depan juga perlu memerhatikan aspek daerah yaitu lebih mengandalkan basis ekonomi lokal. Pembangunan industri berbasis ekonomi lokal merupakan suatu langkah penting untuk membangun ekonomi lokal. Ekonomi lokal diharapkan dapat mengembangkan industri pendukung yang menyediakan bahan baku dan penolong bagi industri lainnya. Dengan demikian, industri pengolahan dapat mengurangiketergantungan terhadap impor bahan baku dan penolong. Untuk itu, daerah harus diberi kesempatan, dorongan, dan insentif agar dapat mengembangkan inisiatif untuk membangun sektor riil berbasis potensi lokal dan mengaitkannya pada kebutuhan pasar nasional dan global. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah kabupaten Lumajang perlu mengupayakan peningkatan produktivitas sektoral di daerahnya dengan beberapa kebijakan yang dapat mendukung pencapaian produktivitas yang tinggi. Salah satu upaya penting yaitu peningkatan kemampuan pendidikan SDM melalui balai latihan kerja dan promosi yang kontinu terkait potensi wilayah dan kemudahan usaha untuk menarik minat investor dari luar.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2017 adalah sebesar 7,59 persen atau terjadi percepatan 2,98 poin dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,61 persen. Subkategori yang mengalami akselerasi pertumbuhan adalah subkategori Industri Makanan dan Minuman sebesar 10,84 persen; Industri Pengolahan Tembakau yang tumbuh sebesar 4,73 persen; Industri kayu, Barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 4,68 persen; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 3,34 persen; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 2,17 persen; serta Industri Barang Galian bukan Logam sebesar 7,86 persen. Adapun subkategori Industri Makanan dan Minuman sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB pada Kategori Industri Pengolahan tumbuh meningkat sebesar 4,86 poin menjadi 10,84 persen pada tahun 2017. Subkategori Industri Tekstil dan Pakaian Jadimengalami perlambatan menjadi 4,60 persen. Kemudian diikuti oleh Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki mengalami perlambatan

4,59 persen dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,62 persen.

Sementara itu subkategori yang mengalami kontraksi terbesar pada tahun 2017 adalah Subkategori Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik tumbuh melambat menjadi minus 1,07 persen dan pada tahun sebelumnya hanya mampu tumbuh sebesar 1,13 persen. Subkategori Industri Alat Angkutan dan Industri Furnitur juga tumbuh melambat, masing-masing menjadi sebesar minus 1,32 persen dan minus 0,03 persen.

4.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha ini merupakan penunjang seluruh kegiatan ekonomi, sebagai salah satu input dalam aktivitas proses produksi selain konsumsi akhir masyarakat. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan untuk wilayah kabupaten Lumajang hanya ada proses distribusi saja, sedangkan produksi gas dihasilkan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dan untuk wilayah kabupaten Lumajang masih belum ada aktifitasnya.

Adapun kategori Pengadaan Listrik dan Gas hanya berkontribusi sebesar 0,05 persen terhadap total PDRB kabupaten Lumajang pada tahun 2017 dan relatif hanya mengalami kenaikan 0,01 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 83,37 persen disumbangkan oleh lapangan usaha Ketenagalistrikan, dan 16,63 persen oleh Pengadaan Gas dan Produksi Es.

Tabel 4.4 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ketenagalistrikan	82,17	82,18	81,44	81,57	83,37
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	17,83	17,82	18,56	18,43	16,63
Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2017 adalah sebesar 3,02 persen atau percepatan sebanyak 0,88 poin dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,14 persen dan juga lebih rendah dari tahun 2015 yang mampu tumbuh sebesar 3,23 persen. Dan jika dilihat pertumbuhan masing-masing subkategori juga mencatatkan pertumbuhan yang

positif. Pada tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 3,08 persen dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 hingga 2016 yang masing-masing tumbuh sebesar 2,50 persen; dan 2,31 persen. Sedangkan subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es hanya tumbuh sebesar 2,64 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,15 persen.

4.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

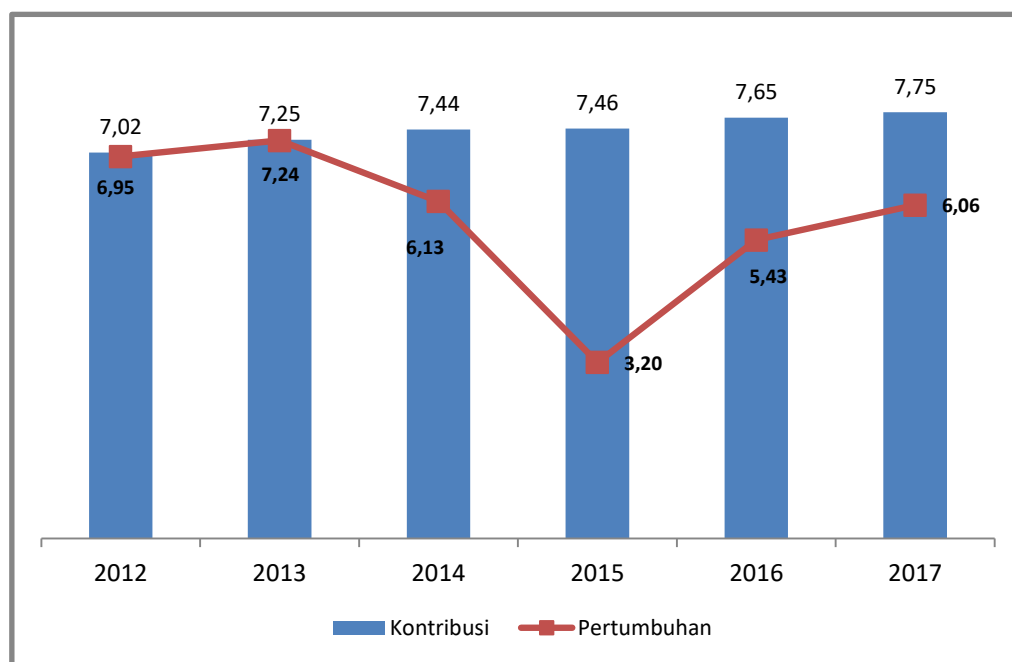
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 hanyasebesar 0,05 persen dan cenderung stagnan selama lima tahun terakhir karena tidak adanya diversifikasi usaha. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2017 sebesar 2,66 persen, menurun dibanding tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen. Meningkatnya pertumbuhan kategori ini selain karena penambahan jumlah pelanggan juga lebih disebabkan karena faktor cuaca yang menyebabkan sumber mata air cenderung membesar sehingga konsumsi air oleh rumah tangga cenderung meningkat.

4.6. Konstruksi

Pada tahun 2016 lapangan usaha kategori konstruksi menyumbang sebesar 7,75 persen terhadap total perekonomian kabupaten Lumajang. Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir peranan lapangan usaha kategori ini cenderung meningkat, tahun 2012 memiliki *share* sebesar 7,02 persen meningkat menjadi 7,25 persen pada tahun 2013, dan di tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing peranannya mencapai 7,44 persen, 7,46 persen dan 7,75 persen. Hal ini membuktikan kinerja pertumbuhan sektor konstruksi maupun peningkatan harganya lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Sedangkan laju pertumbuhannya tahun 2017 sebesar 6,06 persen atau mengalami percepatan dibanding tahun 2016 yang tumbuh 5,43 persen. Adapun pertumbuhan kategori Konstruksi pada tahun 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 7,24 persen; 6,13 persen dan 3,20. Kondisi konstruksi di kabupaten Lumajang selama 5 tahun terakhir selalu tumbuh positif karena giatnya

pembangunan fisik terutama semakin maraknya pembangunan perumahan maupun pemeliharaan jalan, jembatan, perumahan, bangunan komersial serta gedung milik pemerintah.

Gambar 5. Laju Pertumbuhan dan Distribusi Persentase PDRB Lapangan Usaha Kostruksi, 2012-2017 (persen)



4.7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Aktivitas kategori ini adalah sebagai perantara antara kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa sehingga kinerjanya sangat tergantung dari volume kedua kegiatan tersebut. Dalam 5 tahun terakhir kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selalu menyumbang di atas 12 persen terhadap total PDRB. Pada tahun 2017 kontribusi kategori ini sebesar 13,40 persen atau sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,94 persen terhadap total nilai PDRB kabupaten Lumajang. Apabila dilihat peranannya pada masing-masing subkategori, Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasi menyumbang 20,14 persen dan subkategori Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 79,86 persen terhadap lapangan usaha kategori ini.

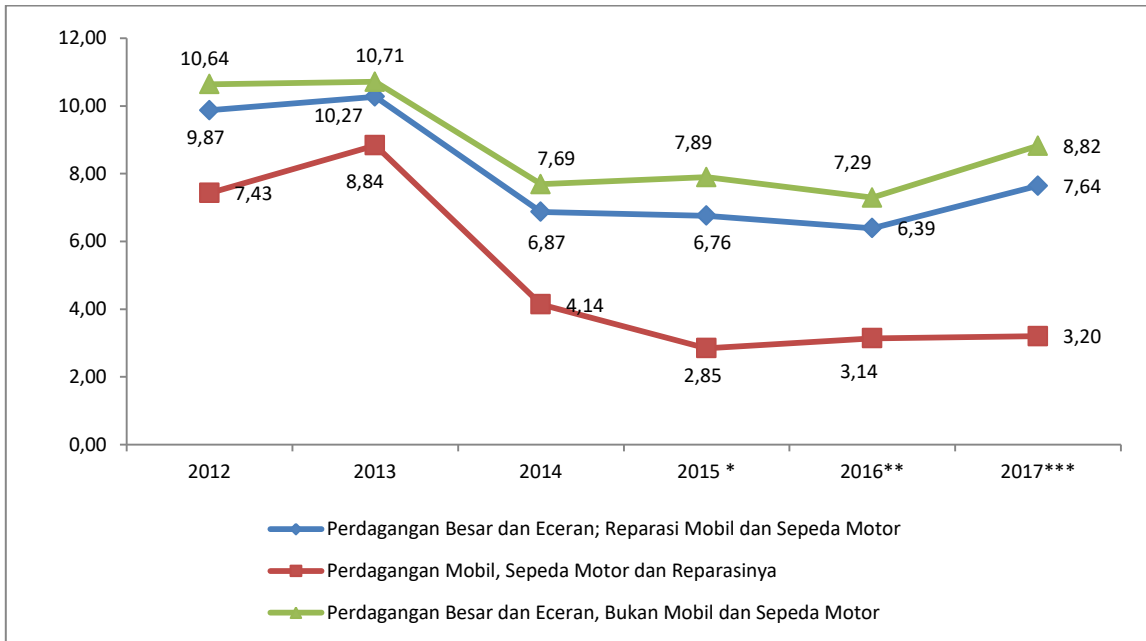
Tabel 4.5 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	24,03	23,16	21,99	20,91	20,14
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	75,97	76,84	78,01	79,09	79,86
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 6. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2012-2017 (persen)



Laju pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2017 sebesar 7,64 persen menguat dibanding tahun 2016 yang sebesar 6,39 persen. Subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya tumbuh 3,20 persen, atau meningkat 0,06 persen poin dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor tumbuh melambat dari 7,29 persen pada tahun 2016 menjadi 8,82 persen pada tahun 2017.

4.8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan berperan penting sebagai salah satu penunjang utama berbagai aktifitas ekonomi. Di kabupaten Lumajang untuk kategori ini hanya ada aktivitas angkutan rel, angkutan darat, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir.

Tabel 4.6 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkutan Rel	0,10	0,12	0,11	0,13	0,13
2. Angkutan Darat	73,05	71,68	70,99	70,95	71,40
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	26,85	28,21	28,89	28,92	28,47
Transportasi dan Pergudangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada tahun 2016 kategori ini memberikan sumbangan sebesar 1,78 persen dan sedikit meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 1,71 persen terhadap perekonomian kabupaten Lumajang. Lapangan usaha subkategori Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 71,40 persen pada tahun 2017 dan sedikit bertambah dari tahun sebelumnya dan jauh berkurang dari tahun 2012 yang mencapai 74,40 persen. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir sebesar 28,47 persen dan Angkutan Rel hanya sebesar 0,13 persen.

Secara keseluruhan kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,96 persen pada tahun 2017, mengalami percepatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 7,67 persen. Apabila dilihat pertumbuhannya pada masing-masing subkategori, semua subkategori tumbuh positif dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha subkategori Angkutan Rel sebesar 8,62 persen lebih cepat dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,53 persen sebagai akibat beberapa kereta api berhenti dan berangkat melalui stasiun Klakah. Subkategori Angkutan Darat juga mengalami peningkatan sebesar 8,24 persen karena pembukaan kembali kegiatan penggalian pasir yang membutuhkan jasa angkutan serta maraknya angkutan pariwisata. Adapun untuk subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 7,12 persen juga mengalami percepatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,02 persen.

4.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2017 kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap total PDRB kabupaten Lumajang sebesar 1,23 persen atau sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,18 persen.

Tabel 4.7 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penyediaan Akomodasi	11,76	12,46	12,28	11,92	11,92
2. Penyediaan Makan Minum	88,24	87,54	87,72	88,08	88,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

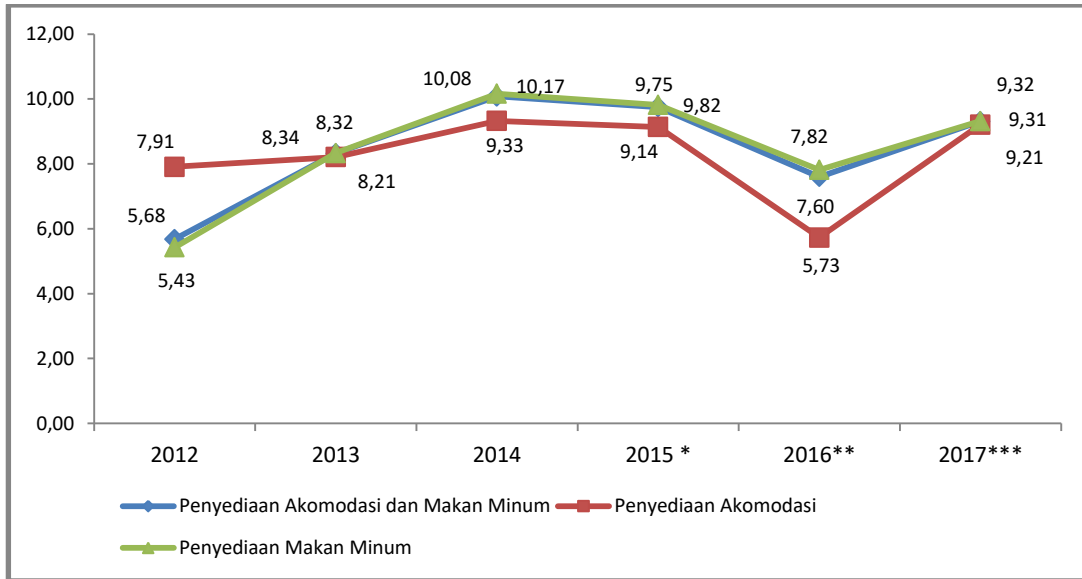
* *Angka sementara*

** *Angka sangat sementara*

Jika dilihat lebih jauh kategori ini lebih didominasi oleh sumbangan subkategori Penyediaan Makan Minum yang mencapai 88,08 persen dan sisanya sebesar 11,92 persen adalah kontribusi subkategori Penyediaan Akomodasi. Hal ini sangat mencerminkan kondisi kunjungan pariwisata dan kunjungan penduduk dari luar kabupaten Lumajang untuk keperluan lainnya yang masih stagnan sehingga kegiatan perhotelan dan jasa akomodasi lainnya kurang menggeliat.

Secara keseluruhan kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan kategori lainnya, yaitu sebesar 9,31 persen pada tahun 2017, lebih cepat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 7,02 persen. Namun karena sumbangan kategori ini relatif kecil terhadap total PDRB kabupaten Lumajang maka tidak terlalu signifikan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi kabupaten. Untuk subkategori Penyediaan makan minum tumbuh sebesar 9,32 persen sebagai akibat masih banyaknya warung dan resto yang bermunculan. Sedangkan untuk subkategori Penyediaan akomodasi di tahun 2017 hanya mampu tumbuh sebesar 9,21 persen juga meningkat dari tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,73 persen.

Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2012-2017 (persen)



4.10. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktifitas di setiap kegiatan ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu wilayah, terutama jasa teknologi informasi dan telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di kabupaten Lumajang tahun 2017 sebesar 3,07 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,02 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan berfluktuasi namun selalu jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi kabupaten. Secara berurutan tahun 2013 tumbuh 11,45 persen, tahun 2014 tumbuh 9,57 persen, tahun 2015 tumbuh 8,86 persen, tahun 2016 tumbuh sedikit melambat menjadi 8,11 persen dan tahun 2017 meningkat menjadi 7,33 persen. Fluktuasi ini menunjukkan tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap akses komunikasi seluler dan layanan internet sebagai akibat diversifikasi promosi layanan antar provider.

4.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Pada tahun 2017 peranan lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap perekonomian kabupaten Lumajang hanya sebesar 1,72 persen. Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, peranannya semakin meningkat, yaitu dari 1,55 persen pada tahun 2012 menjadi 1,63 persen pada tahun 2013, kemudian tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 1,67 persen, 1,70 persen dan 1,71 persen. Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha subkategori Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kategori jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 41,53 persen. Sedangkan subkategori Jasa Keuangan Lainnya dan sub kategori Asuransi dan Dana Pensiun masing-masing peranannya sebesar 32,82 persen dan 25,53 persen.

Tabel 4.8 Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jasa Perantara Keuangan	41,56	41,27	41,70	41,54	41,53
2. Asuransi dan Dana Pensiun	25,04	25,66	25,69	25,78	25,53
3. Jasa Keuangan Lainnya	33,28	32,95	32,49	32,56	32,82
4. Jasa Penunjang Keuangan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif secara keseluruhan lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen, melambat dibanding tahun 2016 yang tumbuh 5,35 persen. Apabila dilihat pertumbuhannya pada masing-masing subkategori, semua mengalami pertumbuhan positif dan hanya sub kategori Asuransi dan Dana pensiun yang tumbuh 3,94 persen dan subkategori Jasa Penunjang Keuangan tumbuh 2,93 persen berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi kabupaten. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha subkategori Jasa Keuangan Lainnya sebesar 5,52 persen dan meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,38 persen. Sedangkan pertumbuhan Jasa Perantara Keuangan mencapai 5,06 persen dan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 5,88 persen.

4.12. Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi yang cenderung stagnan bagi PDRB kabupaten Lumajang dengan peranan sebesar kurang dari 2 persen. Selama tahun 2012-2017, secara berturut-turut sumbangan kategori real estat sebesar 1,54 persen; 1,59 persen; 1,52 persen; 1,57 persen; 1,57 persen dan 1,57 persen. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan properti hunian maupun untuk usaha di kabupaten Lumajang tidak semarak sebagaimana di kota-kota besar.

Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi kategori Real Estat mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen, mengalami perlambatan signifikan bila dibanding tahun 2016 yang mampu tumbuh 5,94 persen. Namun demikian selama periode 2012-2017 kategori Real Estat selalu tumbuh di atas angka pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang, hal ini menunjukkan jumlah konsumen real estat dari tahun ke tahun masih cukup prospektif.

4.13. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan mencakup kegiatan jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, jasa keamanan dan penyelidikan, dan jasa penunjang usaha lainnya. Aktifitas usaha kategori ini relatif stagnan dan tidak seramai di kota-kota besar lainnya yang pangsa pasarnya jauh lebih besar. Pada tahun 2017 peranan kategori Jasa Perusahaan ini dalam perekonomian kabupaten Lumajang hanya sebesar 0,32 persen dan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir.

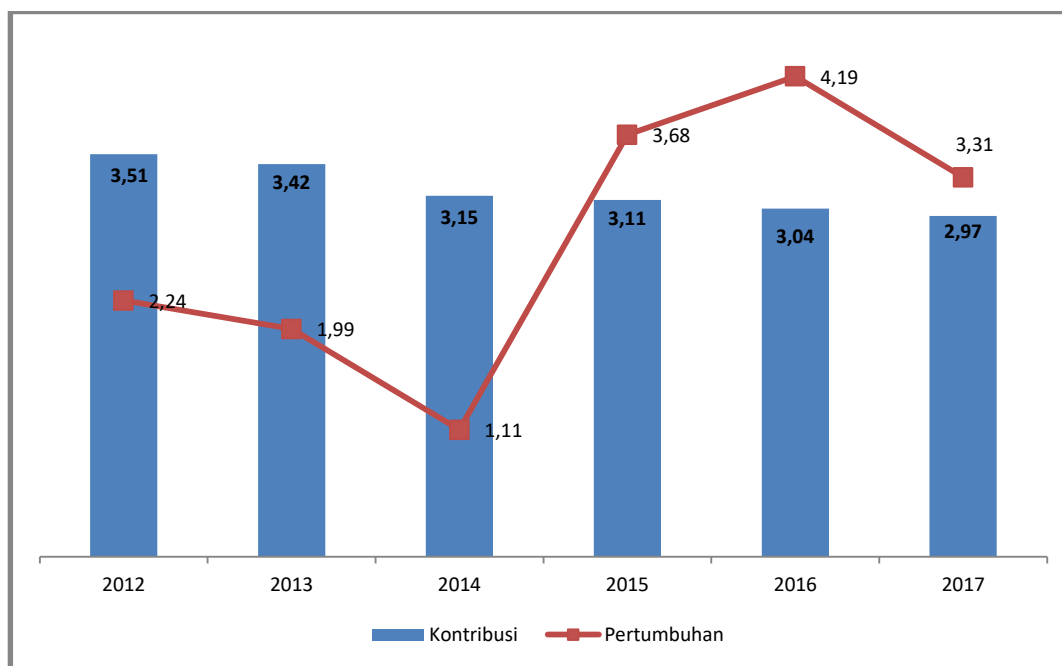
Namun demikian seiring dengan pesatnya pembangunan di Lumajangebberapa tahun terakhir khususnya dibidang ekonomi, pertumbuhan lapangan usaha kategori Jasa Perusahaan ini dalam lima tahun terakhir sebelum tahun 2017 terus meningkat menjadi 6,02 persen. Pada tahun 2012 lapangan usaha kategori ini tumbuh 4,66 persen; tahun 2013 tumbuh 6,06 persen; tahun 2014 tumbuh 6,64 persen; tahun 2015 tumbuh 6,92 persen dan tahun 2016 tumbuh 5,58 persen.

4.14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya bersumber dari anggaran pemerintah, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup

kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

Gambar 8. Laju Pertumbuhan dan Distribusi Peranan PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, 2012-2017 (persen)



Lapangan usaha kategori ini selama tahun 2012-2017 peranannya cenderung menurun, dari 3,51 persen pada tahun 2012 menurun menjadi 3,42 persen di tahun 2013, kemudian di 2014 dan 2015 masing-masing menjadi 3,15 persen dan 3,11 persen akhirnya pada tahun 2017 menjadi 2,97 persen. Kondisi ini lebih disebabkan tingkat pertumbuhannya kalah cepat dibanding lapangan usaha kategori yang lain dan hal ini merupakan capaian positif kinerja perekonomian suatu wilayah dengan tidak terlalu bergantung pada pengeluaran pemerintah serta akan menjadi salah satu sinyal keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah tersebut.

Pada periode yang sama, laju pertumbuhan lapangan usaha kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib cenderung berfluktuasi tetapi di 3 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2012 pertumbuhan lapangan usaha kategori ini tumbuh 2,24 persen, tahun 2013 tumbuh 1,99 persen, tahun 2014 tumbuh 1,11 persen, tahun 2015 tumbuh 3,68 persen, tahun 2016 kembali terjadi percepatan hingga tumbuh mencapai 4,19 persen dan tahun 2017 kembali mengalami perlambatan menjadi 3,31 persen.

4.15. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan, dan penunjang pendidikan. Peranan lapangan usaha Jasa Pendidikan selama kurun waktu lima tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2012 peranan lapangan usaha kategori ini sebesar 2,45 persen, meningkat menjadi 2,50 persen pada tahun 2013 kemudian 2,53 persen di tahun 2014, 2,54 persen di tahun 2015, sedikit melambat 2,52 persen di tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017 menjadi 2,54 persen.

Dengan berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan kabupaten Lumajang tahun 2012-2017 selalu di atas angka pertumbuhan PDRB kabupaten Lumajang sebagai akibat terus meningkatnya jumlah peserta didik dan bermunculannya jasa bimbingan belajar. Pertumbuhan lapangan usaha kategori ini tahun 2017 sebesar 5,92 persen, sedikit lebih cepat dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,78 persen.

4.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; dan Jasa Kegiatan Sosial. Selama lima tahun terakhir peranannya dalam perekonomian kabupaten Lumajang semakin meningkat secara perlahan. Pada tahun 2012 peranan lapangan usaha kategori ini sebesar 0,63 persen, meningkat menjadi 0,65 persen pada tahun 2013, kemudian menjadi 0,66 persen di tahun 2014 dan 0,67 persen di tahun 2015 serta kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 0,68 persen dan pada tahun 2017 menjadi 0,71 persen. Pada periode yang sama pertumbuhan lapangan usaha Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial cenderung berfluktuasi cukup tajam yang tentunya mengikuti jumlah penduduk yang mengakses layanan kesehatan. Pada tahun 2013 pertumbuhan lapangan usaha

kategori ini sebesar 7,69 persen; berikutnya tahun 2014 tumbuh 11,19 persen; tahun 2015 tumbuh jauh melambat menjadi 5,61 persen; tahun 2016 kembali melambat perlahan menjadi 5,32 persen dan tahun 2017 tumbuh jauh meningkat menjadi 6,12 persen.

4.17. Jasa lainnya

Kategori Jasa Lainnya mempunyai kegiatan yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; serta Jasa Swasta Lainnya. Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian kabupaten Lumajang tahun 2017 sebesar 1,59 persen, dengan pertumbuhan sebesar 5,95 persen, lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 6,03 persen. Namun demikian dalam 3 tahun terakhir pertumbuhannya selalu di atas angka pertumbuhan ekonomi kabupaten dengan peranan sektoral yang cenderung meningkat karena laju pertumbuhannya masih lebih cepat dibandingkan kategori lain, yaitu dari 1,49 persen di tahun 2015 kemudian menjadi 1,54 persen di tahun 2016 dan akhirnya di tahun 2017 menjadi 1,59 persen.

Lampiran

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.819,9	8.714,1	9.689,8	10.409,1	10.839,2	11.356,6
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7.132,0	7.926,7	8.804,8	9.473,3	9.807,0	10.227,7
	a. Tanaman Pangan	2.108,0	2.302,8	2.574,0	2.729,6	2.707,9	2.745,1
	b. Tanaman Hortikultura	1.373,6	1.522,8	1.683,8	1.875,2	1.991,9	2.127,3
	c. Tanaman Perkebunan	1.908,1	2.175,5	2.397,9	2.549,5	2.595,8	2.642,2
	d. Peternakan	1.650,3	1.817,9	2.024,2	2.184,3	2.371,2	2.565,3
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	92,0	107,6	124,9	134,8	140,2	147,8
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	202,1	226,2	255,5	253,7	278,1	309,2
	3. Perikanan	485,8	561,3	629,5	682,1	754,1	819,7
B	Pertambangan dan Penggalian	763,2	870,1	941,2	1.075,8	1.181,8	1.297,4
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Pertambangan Biji Logam	30,1	36,2	28,4	0,0	0,0	0,0
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	733,1	833,9	912,8	1.075,8	1.181,8	1.297,4
C	Industri Pengolahan	3.645,8	4.144,8	4.600,8	5.052,1	5.562,0	6.062,6
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Industri Makanan dan Minuman	1.918,6	2.196,0	2.489,5	2.800,4	3.155,9	3.491,8
	3. Pengolahan Tembakau	170,5	191,2	209,9	231,2	253,6	273,9
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	82,5	92,5	101,5	109,4	117,1	126,7
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4,0	4,5	5,1	5,6	6,1	6,5
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	976,7	1.111,0	1.187,4	1.264,8	1.362,8	1.460,6

Lanjutan tabel 1

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	54,4	58,3	62,6	66,3	72,3	78,9
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	15,0	16,4	17,7	18,7	19,5	20,4
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,5	5,7	6,0	6,3	6,5	6,9
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	48,6	51,7	56,3	60,1	66,2	72,1
	11. Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	231,8	262,2	292,6	305,4	311,2	324,8
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
	14. Industri Alat Angkutan	3,5	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9
	15. Industri Furnitur	87,7	99,1	112,1	121,0	124,1	129,9
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	46,6	51,8	55,8	58,8	62,4	65,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,5	9,6	10,6	11,2	13,0	13,8
	1. Ketenagalistrikan	7,0	7,9	8,6	9,2	10,8	11,5
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,5	1,7	2,0	2,1	2,2	2,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	12,5	13,1	14,0	14,6	15,3
F	Konstruksi	1.423,8	1.635,1	1.821,1	2.038,5	2.225,3	2.505,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.551,0	2.833,7	3.137,7	3.446,1	3.846,8	4.318,5
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	613,0	656,4	690,1	720,5	774,7	819,3
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.937,9	2.177,3	2.447,6	2.725,6	3.072,2	3.499,2

Lanjutan tabel 1

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	316,5	363,4	407,9	456,3	511,0	573,9
	1. Angkutan Rel	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
	2. Angkutan Darat	224,7	257,8	289,8	325,1	364,8	412,5
	3. Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	91,4	105,1	117,5	130,6	145,5	160,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	208,7	244,9	281,3	314,8	354,0	400,1
	1. Penyediaan Akomodasi	24,6	30,5	34,6	37,5	42,2	47,9
	2. Penyediaan Makan Minum	184,2	214,4	246,8	277,3	311,8	352,2
J	Informasi dan Komunikasi	611,4	670,1	730,1	805,2	879,8	967,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	320,7	368,1	415,1	455,1	493,9	538,6
	1. Jasa Perantara Keuangan	133,3	151,9	173,1	189,1	205,1	224,7
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	80,3	94,5	106,6	117,3	126,1	135,7
	3. Jasa Keuangan Lainnya	106,7	121,3	134,9	148,2	162,1	177,5
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
L	Real Estat	311,9	333,4	383,2	416,9	450,3	497,7
M,N	Jasa Perusahaan	62,9	69,1	76,7	83,9	91,6	101,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	672,4	691,9	760,1	809,2	853,0	914,3
P	Jasa Pendidikan	491,6	556,0	619,5	672,5	729,7	800,7
Q	Jasa Kesehatan	126,8	145,6	164,2	182,3	202,5	228,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	289,9	320,7	364,6	409,8	455,6	508,4
Produk Domestik Regional Bruto		19.637,0	21.983,1	24.417,1	26.652,8	28.703,9	31.101,1

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.521,7	6.729,7	6.941,3	7.122,6	7.262,2	7.401,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.952,4	6.134,2	6.321,3	6.495,7	6.599,6	6.694,8
	a. Tanaman Pangan	1.707,2	1.761,9	1.816,8	1.862,1	1.865,6	1.868,2
	b. Tanaman Hortikultura	1.216,1	1.252,6	1.291,4	1.349,9	1.364,1	1.376,3
	c. Tanaman Perkebunan	1.592,0	1.650,9	1.711,1	1.744,6	1.788,1	1.824,0
	d. Peternakan	1.355,9	1.382,3	1.412,2	1.447,0	1.487,5	1.529,7
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	81,2	86,5	89,8	92,2	94,3	96,5
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	170,7	173,1	177,4	168,0	180,0	195,0
	3. Perikanan	398,7	422,5	442,6	459,0	482,5	512,1
B	Pertambangan dan Penggalian	710,0	734,1	731,4	787,9	849,0	915,8
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Pertambangan Bijih Logam	28,3	30,4	26,7	0,0	0,0	0,0
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	681,6	703,7	704,7	787,9	849,0	915,8
C	Industri Pengolahan	3.219,3	3.454,5	3.642,3	3.829,7	4.099,4	4.348,7
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	2. Industri Makanan dan Minuman	1.703,3	1.832,2	1.973,9	2.111,5	2.318,8	2.500,1
	3. Pengolahan Tembakau	142,2	157,0	163,5	170,6	178,6	186,6
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	73,3	78,3	83,8	88,1	92,2	97,4
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,5
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	861,7	926,6	937,3	965,7	1.010,9	1.054,1

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	50,4	50,6	51,6	53,2	54,9	57,9
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	13,6	14,5	15,1	15,4	15,7	15,9
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,2
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	44,6	45,0	46,7	48,5	52,3	55,6
	11. Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	197,5	209,9	222,4	224,9	222,5	224,9
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	14. Industri Alat Angkutan	3,2	3,3	3,4	3,5	3,4	3,4
	15. Industri Furnitur	77,0	81,7	87,1	89,3	89,3	90,4
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	43,5	45,9	47,5	48,6	50,1	51,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,6	10,2	10,5	10,7	11,1	11,4
	1. Ketenagalistrikan	8,2	8,8	9,0	9,2	9,5	9,8
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,1	11,2	11,5	11,9	12,2	12,5
F	Konstruksi	1.162,7	1.234,0	1.273,5	1.342,7	1.424,1	1.530,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.287,3	2.444,5	2.609,7	2.776,5	2.988,7	3.193,1
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	527,6	549,4	565,0	582,8	601,4	622,5
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.759,8	1.895,1	2.044,7	2.193,7	2.387,2	2.570,6

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	289,4	315,1	339,1	365,1	394,2	427,3
	1. Angkutan Rel	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
	2. Angkutan Darat	215,9	236,3	254,7	274,8	297,5	323,8
	3. Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	73,2	78,6	84,0	89,9	96,3	103,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185,3	204,0	223,9	240,9	263,3	289,1
	1. Penyediaan Akomodasi	19,3	21,1	23,0	24,4	26,6	29,4
	2. Penyediaan Makan Minum	166,0	182,9	200,8	216,5	236,7	259,8
J	Informasi dan Komunikasi	595,1	652,0	709,8	767,4	823,6	888,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	274,1	293,8	311,6	328,3	344,4	362,2
	1. Jasa Perantara Keuangan	109,8	118,3	127,6	135,1	141,9	149,8
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	70,6	76,7	80,8	84,4	87,7	91,5
	3. Jasa Keuangan Lainnya	93,4	98,5	102,9	108,4	114,4	120,6
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
L	Real Estat	270,3	288,3	308,2	326,5	344,0	369,2
M,N	Jasa Perusahaan	52,9	56,5	60,4	63,7	67,6	71,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	564,2	570,4	591,4	616,2	636,6	664,0
P	Jasa Pendidikan	411,6	439,9	472,6	499,9	529,5	564,8
Q	Jasa Kesehatan	113,6	126,3	133,3	140,4	149,0	160,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	271,4	287,3	306,3	324,8	344,1	364,6
Produk Domestik Regional Bruto		16.949,6	17.851,9	18.676,9	19.555,2	20.542,9	21.575,0

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,82	39,64	39,68	39,05	37,76	36,52
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	36,32	36,06	36,06	35,54	34,17	32,89
	a. Tanaman Pangan	10,74	10,48	10,54	10,24	9,43	8,83
	b. Tanaman Hortikultura	6,99	6,93	6,90	7,04	6,94	6,84
	c. Tanaman Perkebunan	9,72	9,90	9,82	9,57	9,04	8,50
	d. Peternakan	8,40	8,27	8,29	8,20	8,26	8,25
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,47	0,49	0,51	0,51	0,49	0,48
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,03	1,03	1,05	0,95	0,97	0,99
	3. Perikanan	2,47	2,55	2,58	2,56	2,63	2,64
B	Pertambangan dan Penggalian	3,89	3,96	3,85	4,04	4,12	4,17
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pertambangan Biji Logam	0,15	0,16	0,12	0,00	0,00	0,00
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3,73	3,79	3,74	4,04	4,12	4,17
C	Industri Pengolahan	18,57	18,85	18,84	18,96	19,38	19,49
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Industri Makanan dan Minuman	9,77	9,99	10,20	10,51	10,99	11,23
	3. Pengolahan Tembakau	0,87	0,87	0,86	0,87	0,88	0,88
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	4,97	5,05	4,86	4,75	4,75	4,70

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
	11. Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1,18	1,19	1,20	1,15	1,08	1,04
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	15. Industri Furnitur	0,45	0,45	0,46	0,45	0,43	0,42
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
	1. Ketenagalistrikan	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	7,25	7,44	7,46	7,65	7,75	8,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,99	12,89	12,85	12,93	13,40	13,89
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3,12	2,99	2,83	2,70	2,70	2,63
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	9,87	9,90	10,02	10,23	10,70	11,25

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	1,61	1,65	1,67	1,71	1,78	1,85
	1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Angkutan Darat	1,14	1,17	1,19	1,22	1,27	1,33
	3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,47	0,48	0,48	0,49	0,51	0,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,06	1,11	1,15	1,18	1,23	1,29
	1. Penyediaan Akomodasi	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	2. Penyediaan Makan Minum	0,94	0,98	1,01	1,04	1,09	1,13
J	Informasi dan Komunikasi	3,11	3,05	2,99	3,02	3,07	3,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,67	1,70	1,71	1,72	1,73
	1. Jasa Perantara Keuangan	0,68	0,69	0,71	0,71	0,71	0,72
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,41	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
	3. Jasa Keuangan Lainnya	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estat	1,59	1,52	1,57	1,56	1,57	1,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	3,15	3,11	3,04	2,97	2,94
P	Jasa Pendidikan	2,50	2,53	2,54	2,52	2,54	2,57
Q	Jasa Kesehatan	0,65	0,66	0,67	0,68	0,71	0,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,48	1,46	1,49	1,54	1,59	1,63
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,48	37,70	37,17	36,49	35,35	34,31
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	35,12	34,36	33,85	33,28	32,13	31,03
	a. Tanaman Pangan	10,07	9,87	9,73	9,52	9,08	8,66
	b. Tanaman Hortikultura	7,17	7,02	6,91	6,90	6,64	6,38
	c. Tanaman Perkebunan	9,39	9,25	9,16	8,99	8,70	8,45
	d. Peternakan	8,00	7,74	7,56	7,40	7,24	7,09
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,01	0,97	0,95	0,86	0,88	0,90
	3. Perikanan	2,35	2,37	2,37	2,35	2,35	2,37
B	Pertambangan dan Penggalian	4,19	4,11	3,92	4,06	4,13	4,24
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pertambangan Bijih Logam	0,17	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4,02	3,94	3,77	4,06	4,13	4,24
C	Industri Pengolahan	18,99	19,35	19,50	19,48	19,96	20,16
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Industri Makanan dan Minuman	10,05	10,26	10,57	10,70	11,29	11,59
	3. Pengolahan Tembakau	0,84	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,43	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5,08	5,19	5,02	4,94	4,92	4,89

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26
	11. Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1,16	1,18	1,19	1,15	1,08	1,04
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	15. Industri Furnitur	0,45	0,46	0,47	0,46	0,43	0,42
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
	1. Ketenagalistrikan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	6,86	6,91	6,82	6,87	6,93	7,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,49	13,69	13,97	14,20	14,55	14,80
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3,11	3,08	3,03	2,98	2,93	2,89
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10,38	10,62	10,95	11,22	11,62	11,91

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	1,71	1,77	1,82	1,87	1,92	1,98
	1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Angkutan Darat	1,27	1,32	1,36	1,41	1,45	1,50
	3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,09	1,14	1,20	1,23	1,28	1,34
	1. Penyediaan Akomodasi	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14
	2. Penyediaan Makan Minum	0,98	1,02	1,08	1,11	1,15	1,20
J	Informasi dan Komunikasi	3,51	3,65	3,80	3,92	4,01	4,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	1,65	1,67	1,68	1,68	1,68
	1. Jasa Perantara Keuangan	0,65	0,66	0,68	0,69	0,69	0,69
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42
	3. Jasa Keuangan Lainnya	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estat	1,59	1,61	1,65	1,67	1,67	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,33	3,20	3,17	3,15	3,10	3,08
P	Jasa Pendidikan	2,43	2,46	2,53	2,56	2,58	2,62
Q	Jasa Kesehatan	0,67	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,60	1,61	1,64	1,66	1,68	1,69
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 5. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135,80	151,33	168,28	180,78	188,25	197,24
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	133,34	148,19	164,61	177,12	183,36	191,22
	a. Tanaman Pangan	133,25	145,56	162,70	172,53	171,16	173,51
	b. Tanaman Hortikultura	126,09	139,79	154,57	172,11	182,82	195,25
	c. Tanaman Perkebunan	135,04	153,96	169,70	180,43	183,71	186,99
	d. Peternakan	138,14	152,17	169,44	182,83	198,48	214,73
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	131,89	154,24	179,02	194,60	202,38	213,35
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	191,88	214,73	242,61	240,89	264,02	293,61
	3. Perikanan	159,75	184,60	207,02	224,32	248,02	269,58
B	Pertambangan dan Penggalian	113,48	129,38	139,96	161,38	177,28	194,63
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Bijih Logam	108,58	130,71	102,70	-	-	-
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	113,69	129,33	141,56	168,31	184,90	202,98
C	Industri Pengolahan	135,09	153,58	170,48	186,24	205,04	223,49
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	140,18	160,44	181,89	202,71	228,45	252,76
	3. Pengolahan Tembakau	129,29	145,00	159,17	175,27	192,31	207,70
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	131,49	147,43	161,67	174,33	186,56	201,91
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	135,04	153,74	173,46	188,97	205,01	220,35
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	125,41	142,66	152,46	162,40	174,98	187,55

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	116,36	124,79	133,79	141,72	154,60	168,81
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	136,33	149,87	161,48	170,24	177,80	185,64
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	115,88	120,24	127,29	132,38	137,88	145,44
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	131,97	140,50	153,03	163,22	179,87	195,99
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	162,78	184,13	205,50	214,46	218,55	228,09
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	121,38	129,27	139,06	148,27	150,33	156,30
	14. Industri Alat Angkutan	123,96	128,93	134,80	137,58	135,80	136,67
	15. Industri Furnitur	132,20	149,42	168,92	182,32	187,04	195,86
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	109,64	121,89	131,33	138,38	146,86	154,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	103,66	116,97	129,06	137,02	158,55	168,30
	1. Ketenagalistrikan	99,91	112,76	123,29	131,11	155,05	165,13
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	125,32	141,30	162,44	171,20	178,79	186,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	129,53	134,92	141,56	150,50	157,06	164,69
F	Konstruksi	150,03	172,30	191,90	214,81	234,49	264,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149,15	165,68	183,46	201,49	224,92	252,50
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	147,86	158,32	166,45	173,79	186,85	197,61
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	149,57	168,04	188,90	210,36	237,10	270,07

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	136,97	157,25	176,53	197,49	221,13	248,39
	1. Angkutan Rel	146,49	188,27	230,01	255,60	281,46	316,49
	2. Angkutan Darat	130,69	149,95	168,58	189,08	212,19	239,93
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	155,26	178,43	199,51	221,80	246,95	272,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142,30	166,96	191,80	214,61	241,35	272,74
	1. Penyediaan Akomodasi	160,54	199,57	225,96	245,33	275,99	312,86
	2. Penyediaan Makan Minum	140,17	163,16	187,82	211,03	237,32	268,07
J	Informasi dan Komunikasi	136,89	150,04	163,48	180,28	196,98	216,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	159,81	183,44	206,85	226,80	246,11	268,40
	1. Jasa Perantara Keuangan	159,78	182,13	207,52	226,66	245,88	269,34
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	162,78	191,47	216,12	237,79	255,59	275,16
	3. Jasa Keuangan Lainnya	157,69	179,25	199,32	219,00	239,54	262,38
	4. Jasa Penunjang Keuangan	154,94	173,48	193,16	213,87	231,56	247,64
L	Real Estat	142,86	152,72	175,51	191,42	206,75	228,52
M,N	Jasa Perusahaan	138,19	151,74	168,42	184,26	201,09	223,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	132,11	135,96	149,35	159,00	167,60	179,64
P	Jasa Pendidikan	146,98	166,23	185,22	201,06	218,18	239,41
Q	Jasa Kesehatan	156,73	179,91	202,96	225,24	250,21	282,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	120,51	133,32	151,54	170,35	189,38	211,35
Produk Domestik Regional Bruto		137,71	154,16	171,23	186,80	201,18	217,98

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 6. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	113,26	116,87	120,55	123,92	126,13	128,55
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	111,28	114,68	118,18	121,68	123,39	125,17
	a. Tanaman Pangan	107,91	111,37	114,84	117,70	117,92	118,09
	b. Tanaman Hortikultura	111,64	114,99	118,55	123,92	125,20	126,32
	c. Tanaman Perkebunan	112,67	116,84	121,10	124,38	126,54	129,09
	d. Peternakan	113,50	115,71	118,21	121,12	124,51	128,05
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	116,42	123,90	128,67	132,13	136,21	139,38
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	162,04	164,36	168,40	159,49	170,92	185,13
	3. Perikanan	131,12	138,95	145,57	150,94	158,68	168,41
B	Pertambangan dan Penggalian	105,57	109,16	108,76	118,12	127,36	137,38
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Biji Logam	102,37	109,89	96,56	-	-	-
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	105,71	109,13	109,28	123,19	132,83	143,27
C	Industri Pengolahan	119,29	128,00	134,96	141,18	151,12	160,31
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	124,44	133,87	144,22	152,84	167,85	180,98
	3. Pengolahan Tembakau	107,85	119,07	123,97	129,33	135,45	141,50
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	116,76	124,74	133,50	140,41	146,86	155,18
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	113,33	122,36	131,21	138,58	144,95	151,65
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	110,64	118,98	120,35	124,00	129,81	135,35

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	107,86	108,14	110,43	113,72	117,52	123,80
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	123,61	131,72	137,42	140,69	142,92	145,17
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	112,84	116,78	121,05	123,22	125,89	130,59
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	121,28	122,19	126,84	131,87	142,23	151,17
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	138,68	147,43	156,18	157,94	156,25	157,98
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	104,46	105,51	107,78	109,64	108,00	109,13
	14. Industri Alat Angkutan	111,81	115,69	120,56	121,67	120,06	120,45
	15. Industri Furnitur	116,10	123,22	131,26	134,64	134,60	136,23
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	102,30	108,10	111,86	114,46	117,82	120,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	116,99	124,40	128,41	131,16	135,12	139,36
	1. Ketenagalistrikan	118,07	125,55	128,68	131,66	135,71	140,03
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	110,74	117,73	126,85	128,31	131,70	135,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	119,64	121,13	123,82	127,71	131,10	134,59
F	Konstruksi	122,52	130,03	134,20	141,49	150,07	161,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	133,74	142,93	152,59	162,34	174,75	186,70
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	127,25	132,52	136,29	140,57	145,07	150,15
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	135,82	146,26	157,80	169,31	184,24	198,39

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	125,24	136,38	146,74	158,00	170,58	184,94
	1. Angkutan Rel	104,12	113,09	123,68	129,28	140,42	154,13
	2. Angkutan Darat	125,59	137,42	148,17	159,86	173,03	188,33
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	124,29	133,41	142,66	152,67	163,54	175,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126,35	139,08	152,64	164,24	179,53	197,13
	1. Penyediaan Akomodasi	126,25	138,02	150,64	159,27	173,94	192,07
	2. Penyediaan Makan Minum	126,36	139,20	152,87	164,82	180,18	197,72
J	Informasi dan Komunikasi	133,24	145,99	158,92	171,81	184,41	198,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	136,58	146,40	155,28	163,59	171,64	180,51
	1. Jasa Perantara Keuangan	131,63	141,79	152,98	161,97	170,17	179,54
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	143,07	155,49	163,78	171,10	177,84	185,48
	3. Jasa Keuangan Lainnya	137,99	145,50	152,01	160,18	169,03	178,20
	4. Jasa Penunjang Keuangan	125,74	130,62	135,88	142,30	146,46	151,43
L	Real Estat	123,80	132,04	141,18	149,57	157,93	169,53
M,N	Jasa Perusahaan	116,28	123,99	132,57	139,97	148,40	157,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	110,85	112,08	116,21	121,08	125,08	130,47
P	Jasa Pendidikan	123,06	131,53	141,30	149,47	158,32	168,88
Q	Jasa Kesehatan	140,32	156,02	164,77	173,54	184,16	197,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	112,81	119,44	127,33	135,01	143,05	151,57
Produk Domestik Regional Bruto		118,86	125,19	130,97	137,13	143,98	151,21

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,00	11,44	11,20	7,43	4,13	4,77
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8,08	11,14	11,08	7,60	3,52	4,29
	a. Tanaman Pangan	8,45	9,24	11,77	6,04	-0,79	1,37
	b. Tanaman Hortikultura	5,23	10,86	10,58	11,34	6,22	6,80
	c. Tanaman Perkebunan	6,89	14,01	10,22	6,32	1,82	1,78
	d. Peternakan	11,44	10,16	11,35	7,91	8,56	8,19
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	9,97	16,95	16,07	8,70	4,00	5,42
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	15,45	11,91	12,98	-0,71	9,60	11,21
	3. Perikanan	21,34	15,55	12,15	8,36	10,56	8,69
B	Pertambangan dan Penggalian	4,25	14,01	8,17	15,31	9,85	9,78
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Biji Logam	-6,56	20,38	-21,43	-	-	-
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4,75	13,75	9,46	18,90	9,85	9,78
C	Industri Pengolahan	10,40	13,69	11,00	9,25	10,09	9,00
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	8,47	14,46	13,37	11,45	12,70	10,64
	3. Pengolahan Tembakau	7,81	12,15	9,77	10,11	9,73	8,00
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8,06	12,12	9,66	7,83	7,01	8,23
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	13,40	13,85	12,83	8,94	8,49	7,48
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	13,93	13,76	6,87	6,52	7,75	7,18

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2,16	7,25	7,22	5,93	9,09	9,19
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,97	9,94	7,75	5,42	4,44	4,41
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,26	3,77	5,86	4,00	4,16	5,49
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	6,59	6,46	8,92	6,66	10,20	8,96
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	19,88	13,12	11,61	4,36	1,91	4,36
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	8,05	6,50	7,57	6,62	1,39	3,97
	14. Industri Alat Angkutan	9,39	4,01	4,55	2,06	-1,29	0,64
	15. Industri Furnitur	12,65	13,03	13,05	7,93	2,59	4,71
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2,66	11,18	7,74	5,37	6,13	5,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,89	12,84	10,34	6,16	15,72	6,14
	1. Ketenagalistrikan	-4,64	12,86	9,34	6,34	18,26	6,50
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	-0,30	12,75	14,97	5,39	4,44	4,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,95	4,17	4,92	6,32	4,36	4,86
F	Konstruksi	14,02	14,84	11,38	11,94	9,16	12,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,31	11,08	10,73	9,83	11,63	12,26
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	15,81	7,07	5,14	4,41	7,52	5,76
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	12,54	12,35	12,42	11,36	12,72	13,90

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	13,60	14,81	12,26	11,87	11,97	12,33
	1. Angkutan Rel	11,30	28,52	22,17	11,13	10,12	12,44
	2. Angkutan Darat	12,52	14,74	12,42	12,16	12,22	13,07
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	16,37	14,92	11,82	11,17	11,34	10,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,48	17,33	14,88	11,89	12,46	13,00
	1. Penyediaan Akomodasi	19,21	24,31	13,22	8,57	12,50	13,36
	2. Penyediaan Makan Minum	12,76	16,40	15,11	12,36	12,46	12,96
J	Informasi dan Komunikasi	12,07	9,60	8,96	10,28	9,26	9,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,29	14,79	12,76	9,64	8,52	9,05
	1. Jasa Perantara Keuangan	18,96	13,99	13,94	9,23	8,48	9,54
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	15,34	17,63	12,87	10,03	7,48	7,66
	3. Jasa Keuangan Lainnya	13,78	13,67	11,20	9,87	9,38	9,53
	4. Jasa Penunjang Keuangan	21,51	11,97	11,34	10,72	8,27	6,94
L	Real Estat	14,07	6,90	14,92	9,06	8,01	10,53
M,N	Jasa Perusahaan	11,86	9,80	10,99	9,40	9,14	11,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,72	2,91	9,85	6,46	5,41	7,19
P	Jasa Pendidikan	13,05	13,09	11,43	8,55	8,51	9,73
Q	Jasa Kesehatan	13,31	14,79	12,81	10,98	11,09	12,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,10	10,62	13,67	12,41	11,17	11,60
Produk Domestik Regional Bruto		10,42	11,95	11,07	9,10	7,70	8,35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,72	3,19	3,14	2,80	1,96	1,92
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,79	3,05	3,05	2,96	1,60	1,44
	a. Tanaman Pangan	1,13	3,21	3,12	2,49	0,19	0,14
	b. Tanaman Hortikultura	0,41	3,00	3,10	4,53	1,06	0,89
	c. Tanaman Perkebunan	2,94	3,70	3,65	2,71	2,49	2,01
	d. Peternakan	2,32	1,95	2,17	2,46	2,80	2,84
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	5,78	6,42	3,85	2,69	2,33	2,33
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11,16	1,43	2,46	-5,29	7,16	8,32
	3. Perikanan	14,60	5,96	4,77	3,69	5,13	6,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,88	3,40	-0,37	8,61	7,76	7,86
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Biji Logam	-7,26	7,34	-12,13	-	-	-
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,25	3,24	0,14	12,73	7,76	7,86
C	Industri Pengolahan	7,26	7,31	5,44	4,61	7,04	6,08
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	7,62	7,57	7,73	5,98	9,82	7,82
	3. Pengolahan Tembakau	0,67	10,40	4,12	4,32	4,73	4,47
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,79	6,83	7,02	5,18	4,60	5,66
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,62	7,97	7,23	5,62	4,59	4,63
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	7,43	7,53	1,16	3,03	4,68	4,27

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,60	0,26	2,12	2,98	3,34	5,34
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,04	6,56	4,33	2,38	1,58	1,58
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,63	3,49	3,66	1,79	2,17	3,73
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	4,64	0,75	3,81	3,96	7,86	6,29
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	13,32	6,31	5,93	1,13	-1,07	1,11
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,65	1,01	2,15	1,72	-1,49	1,05
	14. Industri Alat Angkutan	6,76	3,47	4,21	0,92	-1,32	0,32
	15. Industri Furnitur	6,70	6,14	6,52	2,58	-0,03	1,21
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,37	5,67	3,48	2,33	2,93	2,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	6,34	3,23	2,14	3,02	3,13
	1. Ketenagalistrikan	3,56	6,34	2,50	2,31	3,08	3,18
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,48	6,31	7,75	1,15	2,64	2,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	1,25	2,22	3,14	2,66	2,66
F	Konstruksi	7,24	6,13	3,20	5,43	6,06	7,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	6,87	6,76	6,39	7,64	6,84
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	8,84	4,14	2,85	3,14	3,20	3,50
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10,71	7,69	7,89	7,29	8,82	7,68

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	8,15	8,89	7,60	7,67	7,96	8,42
	1. Angkutan Rel	0,08	8,62	9,36	4,53	8,62	9,76
	2. Angkutan Darat	8,35	9,42	7,82	7,89	8,24	8,84
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	7,60	7,34	6,93	7,02	7,12	7,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,32	10,08	9,75	7,60	9,31	9,80
	1. Penyediaan Akomodasi	8,21	9,33	9,14	5,73	9,21	10,42
	2. Penyediaan Makan Minum	8,34	10,17	9,82	7,82	9,32	9,73
J	Informasi dan Komunikasi	11,45	9,57	8,86	8,11	7,33	7,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,26	7,18	6,07	5,35	4,92	5,17
	1. Jasa Perantara Keuangan	12,91	7,71	7,89	5,88	5,06	5,51
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	13,36	8,68	5,33	4,47	3,94	4,29
	3. Jasa Keuangan Lainnya	10,70	5,44	4,47	5,38	5,52	5,43
	4. Jasa Penunjang Keuangan	11,73	3,88	4,03	4,72	2,93	3,39
L	Real Estat	6,93	6,66	6,92	5,94	5,34	7,34
M,N	Jasa Perusahaan	6,06	6,64	6,92	5,58	6,02	6,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,99	1,11	3,68	4,19	3,31	4,31
P	Jasa Pendidikan	6,87	6,88	7,43	5,78	5,92	6,67
Q	Jasa Kesehatan	7,69	11,19	5,61	5,32	6,12	7,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,39	5,87	6,61	6,03	5,95	5,95
Produk Domestik Regional Bruto		5,58	5,32	4,62	4,70	5,05	5,02

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119,90	129,49	139,60	145,88	149,26	153,43
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	119,82	129,22	139,29	145,56	148,60	152,77
	a. Tanaman Pangan	123,48	130,70	141,68	146,59	145,15	146,94
	b. Tanaman Hortikultura	112,95	121,57	130,39	138,89	146,02	154,57
	c. Tanaman Perkebunan	119,86	131,78	140,13	145,06	145,17	144,85
	d. Peternakan	121,72	131,52	143,34	150,95	159,41	167,70
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	113,28	124,49	139,14	147,28	148,58	153,07
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	118,42	130,65	144,06	151,03	154,47	158,60
	3. Perikanan	121,83	132,86	142,21	148,61	156,30	160,07
B	Pertambangan dan Penggalian	107,50	118,53	128,69	136,62	139,20	141,67
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Biji Logam	106,07	118,95	106,36	-	-	-
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	107,56	118,51	129,53	136,62	139,20	141,67
C	Industri Pengolahan	113,25	119,98	126,32	131,92	135,68	139,41
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	112,64	119,85	126,12	132,63	136,10	139,66
	3. Pengolahan Tembakau	119,88	121,78	128,39	135,52	141,98	146,78
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	112,61	118,19	121,11	124,16	127,03	130,11
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	119,15	125,64	132,20	136,35	141,44	145,30
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	113,35	119,91	126,68	130,97	134,80	138,57

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	107,88	115,39	121,15	124,62	131,55	136,36
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	110,29	113,78	117,51	121,00	124,41	127,87
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	102,69	102,97	105,15	107,44	109,52	111,38
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	108,82	114,99	120,64	123,77	126,46	129,64
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	117,37	124,89	131,58	135,79	139,87	144,38
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	116,20	122,52	129,03	135,24	139,19	143,22
	14. Industri Alat Angkutan	110,87	111,45	111,81	113,08	113,11	113,47
	15. Industri Furnitur	113,87	121,26	128,69	135,41	138,96	143,77
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	107,17	112,75	117,40	120,89	124,65	128,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	88,61	94,03	100,51	104,46	117,34	120,77
	1. Ketenagalistrikan	84,62	89,81	95,81	99,58	114,25	117,93
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	113,17	120,02	128,06	133,42	135,76	137,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	108,27	111,39	114,33	117,85	119,80	122,36
F	Konstruksi	122,45	132,50	143,00	151,82	156,26	163,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111,53	115,92	120,23	124,12	128,71	135,24
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	116,20	119,47	122,13	123,63	128,80	131,61
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	110,12	114,89	119,71	124,24	128,69	136,13

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	109,37	115,31	120,30	125,00	129,63	134,30
	1. Angkutan Rel	140,70	166,48	185,98	197,71	200,44	205,34
	2. Angkutan Darat	104,06	109,12	113,77	118,28	122,63	127,40
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	124,92	133,74	139,85	145,28	151,00	155,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,63	120,05	125,66	130,67	134,44	138,36
	1. Penyediaan Akomodasi	127,16	144,59	150,00	154,03	158,67	162,89
	2. Penyediaan Makan Minum	110,94	117,21	122,86	128,04	131,71	135,58
J	Informasi dan Komunikasi	102,74	102,77	102,86	104,93	106,82	108,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	117,00	125,31	133,21	138,64	143,39	148,69
	1. Jasa Perantara Keuangan	121,38	128,45	135,65	139,94	144,49	150,02
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	113,78	123,14	131,96	138,98	143,72	148,35
	3. Jasa Keuangan Lainnya	114,27	123,20	131,13	136,72	141,72	147,24
	4. Jasa Penunjang Keuangan	123,22	132,82	142,15	150,30	158,10	163,53
L	Real Estat	115,40	115,66	124,32	127,98	130,91	134,80
M,N	Jasa Perusahaan	118,85	122,38	127,04	131,64	135,51	141,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	119,18	121,30	128,52	131,32	133,99	137,69
P	Jasa Pendidikan	119,44	126,38	131,08	134,52	137,81	141,76
Q	Jasa Kesehatan	111,69	115,31	123,18	129,79	135,87	142,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	106,83	111,62	119,01	126,18	132,38	139,44
Produk Domestik Regional Bruto		115,86	123,14	130,73	136,22	139,73	144,15

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Lumajang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,12	7,99	7,81	4,50	2,31	2,80
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6,18	7,85	7,79	4,50	2,09	2,81
	a. Tanaman Pangan	7,24	5,85	8,40	3,47	-0,98	1,23
	b. Tanaman Hortikultura	4,79	7,63	7,26	6,52	5,13	5,85
	c. Tanaman Perkebunan	3,84	9,95	6,34	3,51	0,08	-0,22
	d. Peternakan	8,92	8,05	8,99	5,32	5,60	5,20
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	3,96	9,89	11,76	5,85	0,88	3,02
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,87	10,33	10,27	4,84	2,28	2,67
	3. Perikanan	5,88	9,05	7,04	4,50	5,17	2,42
B	Pertambangan dan Penggalian	3,34	10,26	8,57	6,17	1,88	1,78
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Biji Logam	0,75	12,15	-10,58	-	-	-
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3,45	10,18	9,30	5,47	1,88	1,78
C	Industri Pengolahan	2,94	5,95	5,28	4,44	2,85	2,75
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	0,79	6,40	5,23	5,16	2,62	2,62
	3. Pengolahan Tembakau	7,10	1,58	5,43	5,55	4,77	3,38
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,18	4,96	2,46	2,52	2,31	2,43
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,36	5,45	5,22	3,14	3,73	2,73
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6,05	5,79	5,65	3,38	2,93	2,79

Lanjutan tabel 10

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,56	6,96	4,99	2,86	5,56	3,66
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,86	3,17	3,27	2,97	2,82	2,78
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,62	0,27	2,12	2,17	1,94	1,69
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	1,87	5,67	4,92	2,60	2,17	2,52
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	5,79	6,40	5,36	3,19	3,01	3,22
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	7,36	5,44	5,31	4,82	2,92	2,89
	14. Industri Alat Angkutan	2,46	0,52	0,33	1,13	0,03	0,32
	15. Industri Furnitur	5,58	6,49	6,13	5,22	2,62	3,46
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2,29	5,21	4,12	2,97	3,11	2,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,93	6,12	6,89	3,94	12,33	2,92
	1. Ketenagalistrikan	-7,92	6,13	6,68	3,94	14,73	3,22
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	-1,75	6,06	6,69	4,19	1,75	1,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,89	2,88	2,64	3,08	1,65	2,14
F	Konstruksi	6,33	8,21	7,92	6,17	2,92	4,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,76	3,94	3,72	3,23	3,70	5,07
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6,40	2,81	2,23	1,23	4,18	2,18
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,66	4,33	4,19	3,79	3,58	5,78

Lanjutan tabel 10

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	5,04	5,43	4,33	3,90	3,71	3,60
	1. Angkutan Rel	11,22	18,32	11,71	6,31	1,38	2,44
	2. Angkutan Darat	3,85	4,86	4,27	3,96	3,68	3,89
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	8,15	7,06	4,57	3,88	3,94	3,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	6,59	4,67	3,99	2,88	2,92
	1. Penyediaan Akomodasi	10,16	13,71	3,74	2,69	3,01	2,66
	2. Penyediaan Makan Minum	4,08	5,66	4,82	4,21	2,87	2,94
J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,03	0,09	2,01	1,80	2,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	7,10	6,31	4,08	3,43	3,70
	1. Jasa Perantara Keuangan	5,35	5,82	5,61	3,16	3,25	3,83
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	1,75	8,23	7,16	5,32	3,41	3,22
	3. Jasa Keuangan Lainnya	2,78	7,81	6,44	4,26	3,66	3,90
	4. Jasa Penunjang Keuangan	8,76	7,79	7,03	5,73	5,19	3,43
L	Real Estat	6,67	0,23	7,48	2,95	2,29	2,97
M,N	Jasa Perusahaan	5,47	2,97	3,81	3,62	2,94	4,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	1,78	5,95	2,18	2,03	2,76
P	Jasa Pendidikan	5,78	5,81	3,72	2,62	2,45	2,87
Q	Jasa Kesehatan	5,22	3,24	6,82	5,37	4,68	4,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,62	4,49	6,62	6,02	4,92	5,33
Produk Domestik Regional Bruto		4,58	6,29	6,17	4,20	2,57	3,17

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka estimasi

Tabel 11. Beberapa Agregat PDRB dan PDRB Per kapita Kabupaten Lumajang, 2014-2018

Sektor/Sub Sektor	2014	2015	2016 *)	2017**)	2018***)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU :					
1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (JUTA RUPIAH)	21.983.119,39	24.417.114,79	26.652.841,83	28.703.889,05	31.101.085,10
2. PENYUSUTAN (JUTA RUPIAH)	1.318.987,16	1.465.026,89	1.599.170,51	1.722.233,34	1.866.065,11
3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTA RUPIAH)	20.664.132,22	22.952.087,90	25.053.671,32	26.981.655,71	29.235.019,99
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG (JUTA RUPIAH)	206.641,32	229.520,88	250.536,71	269.816,56	292.350,20
5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR FAKTOR PRODUKSI (JUTA RUPIAH)	20.457.490,90	22.722.567,03	24.803.134,61	26.711.839,15	28.942.669,79
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA)	1.026.378	1.030.193	1.033.698	1.036.823	1.039.794
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA (RUPIAH)	21.418.151,39	23.701.495,54	25.783.973,49	27.684.464,03	29.910.814,16
8. PENDAPATAN PER KAPITA (RUPIAH)	19.931.731,68	22.056.611,75	23.994.565,73	25.763.162,23	27.835.003,66
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN DASAR 2010 :					
1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (JUTA RUPIAH)	17.851.856,60	18.676.946,21	19.555.167,96	20.542.930,67	21.575.037,98
2. PENYUSUTAN (JUTA RUPIAH)	1.071.111,40	1.120.616,77	1.173.310,08	1.232.575,84	1.294.502,28
3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTA RUPIAH)	16.780.745,20	17.556.329,44	18.381.857,89	19.310.354,83	20.280.535,70
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG (JUTA RUPIAH)	167.807,45	175.563,29	183.818,58	193.103,55	202.805,36
5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR FAKTOR PRODUKSI (JUTA RUPIAH)	16.612.937,75	17.380.766,15	18.198.039,31	19.117.251,28	20.077.730,34
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA)	1.026.378	1.030.193	1.033.698	1.036.823	1.039.794
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA (RUPIAH)	17.393.062,40	18.129.560,40	18.917.679,98	19.813.343,91	20.749.338,79
8. PENDAPATAN PER KAPITA (RUPIAH)	16.185.983,87	16.871.368,90	17.604.792,99	18.438.297,84	19.309.334,68
9. INDEKS IMPLISIT PDRB	123,14	130,73	136,30	139,73	144,15
10. INFLASI PDRB (%)	6,29	6,17	4,25	2,52	3,17
11. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	5,32	4,62	4,70	5,05	5,02

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka estimasi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA